

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan di sebuah daerah, khususnya kota besar memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat dipengaruhi antara lain kepadatan populasi serta konversi penggunaan lahan, hal tersebut dapat mempengaruhi timbulnya degradasi lingkungan. Hanson *et. al.* & Birkmann *et. al.*, memiliki pendapat mengenai penyebab degradasi lingkungan ialah adanya penggunaan lahan yang tinggi, seperti yang saat ini terjadi di berbagai kota besar ialah pembangunan kota dengan pemanfaatan lahan yang berlebih dan tidak terkendali.¹² Tren urbanisasi memiliki dampak lingkungan. Antisipasi yang dapat dilakukan, khususnya oleh pemerintah kota ialah dengan cara meningkatkan kapasitas kota, salah satunya yaitu dengan melalui perencanaan serta praktik kota yang baik. Pemerintah lokal harus lebih memerhatikan kebijakan yang *berimpact* pada keberhasilan peningkatan kapasitas kota tersebut, beberapa kebijakan tersebut yaitu peraturan untuk mengatur penggunaan lahan hijau, ketersediaan infrastruktur perkotaan, hingga upaya dari pemerintah untuk menyadarkan penduduk mengenai bahaya alam yang disebabkan kegiatan pencemaran lingkungan yang biasa dilakukan oleh kaum urban.³

Langkah yang dapat diambil pemerintah kota dalam menciptakan praktik kota yang baik salah satunya ialah dengan berpatokan pengelolaan kota lain sebagai media pembelajaran perihal inisiasi program atau cara yang berhasil diimplementasikan oleh kota lain tersebut dalam menangani permasalahan yang cenderung serupa. Sejauh ini, kegiatan tersebut dapat difasilitasi pada program kerja sama *sister city*, yang mana kerja sama ini mengizinkan adanya kolaborasi

¹ Birkmann, J., Garschagen, M., Kraas, F., & Quang, N. "Adaptive urban *governance*: new challenges for the second generation of urban adaptation strategies to climate change". *Sustainability Science*, 5(2), 2010: 185-206.

² Hanson, S., Nicholls, R., Ranger, N., Hallegatte, S., Corfee-Morlot, J., Herweijer, C., & Chateau, J. "A global ranking of port cities with high exposure to climate extremes. *Climatic change*", 104(1), 2011: 89-111.

³ Broto, V. C., & Bulkeley, H. "A survey of urban climate change experiments in 100 cities. *Global environmental change*", 23(1), 2013: 92-102.

antara kota yang terlibat.⁴ Konsep kota kembar atau lebih dikenal dengan sebutan *sister city* merupakan konsep kerja sama yang secara formal disetujui dengan diikat dalam perjanjian *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh dua kota penyelenggara. Beberapa ranah yang dapat dikerjakan samakan berupa ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hingga lingkungan. Di Indonesia, *sister city* diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 dimana disebutkan bahwa kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (*Sister Province / Sister City*), dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasar pada prinsip menghormati kedaulatan NKRI, persamaan kedudukan tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.⁵

Sister city bukanlah suatu konsep yang baru, *sister city* muncul pada awal abad ke-19 di Eropa. Lalu menyusul di North-America yang masuk pada tahun 1950an. Pada 1989, Prancis dan Jerman Timur tercatat memimpin daftar kerja sama *sister city* dengan masing-masing memiliki lebih dari 3500 dan 3000 mitra *sister city*. Di Indonesia, *Sister City* semakin dikenal ketika Departemen Luar Negeri mengeluarkan surat edaran berupa PERMENDAGRI no 6/1973 tentang kerja sama dan bantuan teknis luar negeri. Saat ini, perkembangan *sister city* di Indonesia telah tercatat sebanyak 47 kota dari 33 provinsi di Indonesia yang memiliki hubungan *sister city* maupun yang pernah melaksanakan kerja sama tersebut.⁶ Menurut Kementerian Luar Negeri, 20% dari total hubungan *sister city* yang ada di Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik, 15% cukup baik dan 65% hampir tidak memiliki kegiatan sama sekali.⁷ Masih tingginya presentase keberlangsungan program *sister city* yang tidak sukses tersebut dipengaruhi oleh perhatian

⁴ Tjandradewi, B. I., & Marcotullio, P. J. "City-to-city networks: Asian perspectives on key elements and areas for success". *Habitat International*, 33(2), 2009: 165-172.

⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2006. Diakses pada 20 Februari 2020 melalui https://jdih.kemlu.go.id/Permenlu_09-A-KP-XII-2006-01.pdf; internet.

⁶ Sitinjak, Efraim., Saut Sagala dan Elishabet Rianawati. *Opportunity for Sister City Applicatin to Support Resilience City*. Working Paper Series, 2014.

⁷ Salam, U., *Dinamika Kerja Sama Internasional Provinsi di Indonesia dengan Luar Negeri* (Makalah Lokakarya Cara Penanganan Kerja sama Internasional), 2004.

pemerintah yang kurang terlalu menganggap serius konsep pembelajaran dari *sister city*. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahkan belum terlalu mendalami konsep dari *sister city* sendiri. Yang terjadi perhari ini, hampir seluruh kegiatan dari kerja sama *sister city* didominasi oleh peran pemerintah kota saja, tidak bersama masyarakat dan swasta. Pada semestinya skema konsep pada kerja sama *sister city* yang ideal adalah saling berperannya dan bersinerginya para *stakeholdernya*.

Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia termasuk kota yang aktif dan *aware* dengan adanya kerja sama *sister city*. Mulai tahun 1992 hingga sekarang, Surabaya telah memiliki relasi sebanyak lebih dari 10 kota kembar di dunia, dengan tingkat proses kerja sama yang berbeda. Daya tarik Kota Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua setelah Kota Jakarta di Indonesia sekaligus berstatus sbagai kota metropolitan, membuat kota ini dengan mudah mencari mitra untuk menjalin kerja sama. Keadaan Surabaya saat ini memang dapat dikatakan sebagai “pasar”, seluruh usaha baik barang maupun jasa dipastikan laku di Surabaya, bahkan pelaku “pasar” di Surabaya tidak sedikit yang berasal dari luar Surabaya. Data PDRB Kota Surabaya menyebutkan dasar harga berlaku menurut lapangan usaha selalu meningkat tiap tahunnya.

Tabel I. 1 PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Juta Rupiah)

Kategori/ Category	Uraian/ Description	2012	2013	2014	2015*	2016**
A	Pertanian, kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	323 828.1	607 877.3	671 441.5	746 378.0	806 811.9
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	19 364.4	21 401.3	24 336.1	26 841.9	29 145.2
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	97 162 324.8	82 295 293.8	70 996 473.9	78 134 471.1	89 213 283.8
D	Pengediaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	2 483 997.0	3 951 115.4	2 001 207.8	2 093 847.8	2 144 720.8
E	Pengediaan Air, Pengaliran Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	497 833.7	543 488.9	572 049.4	626 333.2	678 566.7
F	Konstruksi/ Construction	29 895 785.9	33 625 371.0	37 876 186.5	40 628 390.0	45 103 247.1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	83 247 148.7	92 833 744.4	99 866 844.3	111 877 360.3	124 579 379.3
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	14 197 124.8	16 243 330.7	19 016 373.3	21 370 838.8	23 647 908.7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	40 824 232.8	46 317 890.3	54 062 910.8	61 615 863.0	70 854 863.3
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and communication	16 922 208.8	19 038 483.0	20 137 828.3	22 160 886.7	24 437 105.4
K	Jasa keuangan dan Asuransi/ Financial and insurance Activities	13 741 235.9	18 897 668.3	19 275 906.5	21 840 835.2	24 105 835.2
L	Real Estate/ Real Estate Activities	7 901 293.4	8 747 168.7	9 372 176.5	10 706 034.4	11 614 141.3
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	7 202 186.9	8 072 648.6	8 889 028.2	9 852 481.8	10 926 169.8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social security	4 640 637.8	4 968 805.2	5 071 610.6	5 802 249.0	6 221 289.5
P	Jasa Pendidikan/ Education	7 207 560.5	8 329 240.0	9 239 950.7	10 156 316.5	11 036 182.8
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	2 154 866.5	2 472 708.3	2 814 318.8	3 089 796.0	3 589 778.0
R,S,T,U	Jasa lainnya/ Other Services Activities	4 459 133.8	4 839 845.2	5 382 299.4	6 092 795.5	6 676 341.9
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		295 180 803.8	327 802 039.6	345 350 944.4	405 223 496.2	431 486 791.0

* Angka Sementara/ Provisional figures

** Angka Sangat Sementara/ Very Provisional figures

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Kerja sama *sister city* Surabaya dengan tiap negara mitra memiliki fokus masing-masing dalam berbagai sektor, dapat dilihat bentuk kerja sama tersebut pada tabel I.2 berikut ini.

Tabel I. 2 Sektor-sektor dalam program *sister city* di Kota Surabaya

No	Kota Mitra	Bidang/Ruang Lingkup Kerja sama
1	Seattle (Amerika Serikat)	1) Manajemen Perkotaan; 2) Manajemen Pelabuhan; 3) Perlindungan LH; 4) Pendidikan; 5) Kesenian dan Kebudayaan; 6) IPTEK; 7) Pengembangan Dunia Usaha
2	Busan (Korea)	1) Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; 2) Pengembangan Pelabuhan; 3) Lingkungan hidup dan pengelolaan kota; 4) Perdagangan dan Pengembangan Ekonomi; 5) Peningkatan SDM, IPTEK; 6) Transportasi dan Pariwisata; 7) Bidang lain
3	Kochi (Jepang)	4) Pendidikan; 2) Industri; 3) Pariwisata; 1) Ekonomi & Perdagangan; 5) Bidang lain yang disepakati
4	Monterrey(Mexico)	1) Promosi Perdagangan; 2) Promosi Investasi; 3) Promosi Industri; 4) Promosi Pariwisata; 5) Promosi Kebudayaan
5	Guangzhou (Tiongkok)	1) Promosi Usaha; 2) Pertukaran Tata Cara Manajemen Perkotaan; 3) Kebudayaan, pendidikan, kesenian; 4) Pemuda dan Olahraga; ; 5) Perdagangan dan Pariwisata;
6	Xiamen (Tiongkok)	1) Ekonomi; 2) Perdagangan; 3) IPTEK; 4) Pendidikan, Olahraga, Kebudayaan; 5) Kesehatan
7	Varna (Bulgaria)	1) Ekonomi, indusdtri dan perdagangan; 2) Pendidikan dan IPTEK 3) Transportasi; 4) Kesehatan; 5) Kebudayaan, kesenian, pariwisata
8	Ktakyushu (Jepang)	1) Bidang-bidang lingkungan termasuk: masyarakat rendah karbon, Daur ulang sumber daya, peningkatan kapasitas pejabat;). Bidang-bidang lain yang disepakati oleh para pihak secara tertulis
9	Marseille (Perancis)	1) Kebudayaan dan Pariwisata; 2) Perdagangan dan industri; 3) IPTEK
10	Shah Alam (Malaysia)	1) Perencanaan kota; 2) Kebudayaan dan Pariwisata; 3) Pemuda dan Olahraga
11	Jiangmen (Tiongkok)	1) Ekonomi dan Perdagangan; 2) Kebudayaan; 3) Pariwisata; 4) Pendidikan; 5) Bidang lain yang sepakati kedua pihak
12	Liverpool	1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Ekonomi; 4) Bidang lain yang dispakati kedua pihak

Sumber: Bagian Administrasi Kerja sama Pemerintah Kota Surabaya

Tabel tersebut menunjukkan bahwa, Surabaya dinilai mampu mengelola kerja sama *sister city* secara *sustainable*. Dalam pelaksanaannya, kerja sama ini didukung ketersediaan sumber anggaran yang disinergikan dengan program pembangunan Pemerintah Kota Surabaya.⁸ Data tersebut menunjukkan bahwa dari sekian banyak kerja sama *sister city*, ada salah satu kerja sama *sister city* yang berbeda dan penting, yaitu kerja sama *sister city* yang dijalin oleh Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu. Kerja sama antara Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu ini lebih dikenal dengan *Green Sister City*. Kerja sama ini dianggap memiliki urgensi karena alasan Kota Surabaya adalah kota dengan luas wilayah 347 km² itu memiliki jumlah penduduk sebanyak 2,886 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk di kota tersebut sebesar 0,527% /tahun (data per 2018)⁹, maka logikanya semakin tinggi jumlah pertumbuhan penduduk maka akan berdampak pula pada permasalahan sampah. Hal tersebut didukung fakta bahwa Kota Surabaya dengan segala daya tariknya memang memiliki segudang permasalahan lingkungan seperti penumpukan sampah, pembuangan limbah pabrik industri, serta semakin padatnya masyarakat yang bermukim di Surabaya yang semakin memperparah keadaan. Dari banyaknya permasalahan lingkungan yang dimiliki Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya merasa perlu untuk mengubah stigma masyarakat agar dapat bergerak bersama menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada.

Kota Kitakyushu merupakan satu - satunya kota mitra *sister city* yang ditunjuk oleh Surabaya dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan di Surabaya. Adanya kesamaan keadaan kota dan sejarah antara Kota Kitakyushu dengan keadaan Kota Surabaya, mendorong adanya hubungan kerja sama yang berfokus pada bidang lingkungan. Kota Kitakyushu pada tahun 1960an merupakan

⁸ Wawancara dengan Bu Rahmasari, Staf Bagian Administrasi Kerja sama Luar Negeri pada tanggal 22 November 2019 di kantor Pemerintah Kota Surabaya.

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2000, 2010 dan 2018*. 2019. Diakses pada 29 Februari 2020 melalui <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/09/1614/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2000-2010-dan-2018.html>; internet.

kota terpolutif, hal ini dikarenakan Kitakyushu merupakan salah satu kota yang berada di Jepang, yang mana Jepang merupakan negara industri besar di dunia, sehingga banyak pabrik besar berada di dalam negara tersebut, khususnya di Kota Kitakyushu, dimana di dalam kota tersebut berdiri pabrik baja yaitu Yahata Steel, pabrik tersebut merupakan afiliasi dari produsen terbesar baja di Jepang. Kala itu, kondisi kota Kitakyushu sangat penuh dengan polusi, dimana langit menjadi abu-abu, air berwarna violet dan kotor karena limbah industri, banyak anak yang terkena penyakit pernafasan. Berangkat dari kondisi carut marut penuh polusi tersebut, mulailah adanya inisiatif oleh asosiasi ibu rumah tangga yang mengeluarkan petisi kepada dewan kota dan industriawan. Hal tersebut lalu mendapatkan dukungan dari kalangan akademisi. Perjuangan yang dilakukan tersebut akhirnya membuahkan hasil, sepanjang 1972 sampai 1991 Kota Kitakyushu berbenah hingga menjadi kota terbersih di Jepang hingga memperoleh penghargaan UNEP (*United Nations Environmental Programme's*) *Global 500 Awards* serta dinobatkan menjadi perlambangan SDGs (*Sustainable Development Goals*). Permasalahan lingkungan yang dimiliki Surabaya dinilai memiliki kemiripan dengan kondisi Kota Kitakyushu dahulu kala, hal tersebut lah yang memberikan rasa optimisme kepada Kota Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada dengan cara mencontoh jejak Kitakyushu.

Sejak tahun 1997, hubungan kota Surabaya dan kota Kitakyushu sudah terjalin. Hal ini dibuktikan oleh adanya partisipasi kota Surabaya di Conference yang diadakan oleh Pemkot Kitakyushu dengan ditanda tangannya "*Joint Declaration of The Kitakyushu Conference on Environmental Cooperation among Cities in the Asian Region*". Fokus kerja sama pada 1998 – 2006 ialah dibidang pengelolaan sampah, salah satu program pertama yang diselenggarakan adalah keranjang TAKAKURA yang mana kegiatan tersebut mendorong masyarakat Surabaya untuk aktif berpartisipasi mengolah sampah organik menjadi kompos skala kecil, keranjang TAKAKURA sukses berdampak pada pengurangan volume sampah sebesar 32%. Berlanjut pada 2007, adanya program kerja sama antar kedua belah pihak yaitu pemberian bantuan oleh Pemkot Kitakyushu untuk merevitalisasi sungai Kalimas yang meliputi 2 (dua) hal), yakni pengembangan partisipasi

masyarakat dan peningkatan kualitas air.¹⁰ Kerja sama ini terus berlanjut hingga bulan November 2012 sesuai arahan KEMENLU, MoU (*Memorandum of Understanding*) *Sister City* atau lebih dikenal MoU *Green City* secara sah ditandatangani oleh Pemerintah kota Surabaya dan Pemerintah kota Kitakyushu.¹¹

Dalam kerja sama *sister city* Surabaya – Kitakyushu, bidang yang telah difokuskan oleh kedua pemerintah kota tersebut ialah peningkatan kapasitas pejabat masing-masing kota, daur ulang sumber daya, masyarakat rendah karbon, dan bidang lain seperti bidang lingkungan yang telah disepakati secara tertulis maupun tidak tertulis.¹² *Sister city* Surabaya – Kitakyushu memiliki jangka waktu yang telah terjalin selama tahun 2012 – 2019, dan akan terus dilanjutkan mulai tahun 2020.¹³ *Green city* sendiri merupakan wujud program bagian dari penataan kota berbasis lingkungan yang bertujuan untuk menciptakan *Less Carbon City*, artinya apabila *Less Carbon City* benar-benar terwujud maka kerja sama *sister city* Surabaya – Kitakyushu memiliki *impact* yang luar biasa, karena hal ini akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang lain, salah satu contoh kebijakan yang mendukung terciptanya *less carbon city* ialah kebijakan transportasi massa seperti yang telah dikembangkan oleh Jakarta, yaitu MRT yang memiliki dampak bagi pola mobilitas masyarakat. Sebelumnya kebijakan yang mendukung terciptanya *green city* di Kota Surabaya yaitu konsep tata ruang yang tercantum dalam Raperda RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) Jawa Timur tahun 2005-2020, yang menyebutkan bahwa minimal 20% dari luas kota, sebesar 10% berupa hutan kota.

Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Kitakyushu sepakat untuk menjalin hubungan kerja sama dalam rangka membangun lingkungan strategis yang diarahkan pada pembangunan berkelanjutan dengan visi *green sister city* yaitu

¹⁰ Antara Jatim. *Surabaya-Kitakyushu Kerja Sama "Green Sister City"*. Diakses pada 2 Februari 2020 melalui <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/98805/surabaya-kitakyushu-kerja-sama-green-sister-city>; internet.

¹¹ Wawancara dengan Bu Rahmasari, Staf Bagian Administrasi Kerja sama Luar Negeri pada tanggal 22 November 2019 di kantor Pemerintah Kota Surabaya. Dokumentasi: Audio, Visual, Dokumen.

¹² *Kerja sama Kitakyushu untuk Surabaya*. Diakses pada 1 November 2019 melalui <https://humas.surabaya.go.id>; internet.

¹³ Wawancara dengan Bu Rahmasari, Staf Bagian Administrasi Kerja sama Luar Negeri pada tanggal 22 November 2019 di kantor Pemerintah Kota Surabaya. Dokumentasi: Audio, Visual, Dokumen.

menjadikan kedua kota menjadi masyarakat rendah karbon atau ‘*low carbon society*’. Dalam pelaksanaannya kerja sama ini memiliki program kerja yang diselenggarakan dengan tujuan yang telah disepakati.

Berdasarkan program kerja *sister city* Surabaya – Kitakyushu yang telah dilaksanakan pada periode 2012 hingga 2019, salah satu program kerja yang akan dibahas mendalam pada penelitian ini ialah program pengolahan limbah sampah, yaitu program mengenai pengelolaan sampah padat dan pengembangan fasilitas pemilahan sampah serta *composting* guna mewujudkan masyarakat *lowcarbon* yang dilaksanakan mulai tahun 2013. Program ini digadang sebagai *pilot project* bagi program serupa selanjutnya yang untuk pertama kalinya diinisiasi di daerah Sutorejo sebagai tempat pemilahan sampah, lalu di Wonorejo sebagai tempat untuk pengembangan *composting*.

Dalam keberadaannya, sampah memiliki dampak terhadap lingkungan sekitarnya, sampah yang tidak diolah dan tidak dipilah membuat sampah menjadi menumpuk hingga akhirnya menyebabkan banyak permasalahan, salah satunya yaitu banjir sampah hingga wabah penyakit pada masyarakat. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, program pengolahan limbah sampah dilatar belakangi oleh keadaan darurat sampah yang pernah terjadi di Surabaya, *image* Kota Surabaya sempat dikenal dengan sebutan kota kumuh, panas, tidak layak huni, sungai tercemar sehingga warga kesulitan mendapat air bersih dan menimbulkan penyakit kulit, bahkan pada awal tahun 2001, Surabaya mengalami “banjir sampah” dikarenakan penutupan TPA Keputih.¹⁴ Maka dari itu program pengolahan limbah sampah yang dilaksanakan oleh Kota Surabaya yang bermitra dengan Kota Kitakyushu memiliki urgensi untuk dilaksanakan.

Program pengolahan limbah sampah memiliki tujuan utama yaitu (1) meminimalkan jumlah *residue* yang dibuang ke TPA untuk memperpanjang umur TPA. (2) Pengembangan usaha di bidang pengelolaan sampah sebagai industri resmi. Sasaran target pengurangan sampah yang dibuang ke TPA ialah 30% dari total sampah yang masuk ke Super Depo Sutorjo. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-

¹⁴ Liputan6. Warga Keputih Memblokir TPA, Surabaya Dipenuhi Sampah, 2001. Diakses pada 25 Januari 2020 melalui <https://www.liputan6.com/news/read/21996/warga-keputih-memblokir-tpa-surabaya-dipenuhi-sampah>; internet.

kegiatan yang dilakukan untuk mencapai *outputs* dan *outcomes* dari program ini ialah dengan adanya pemilahan sampah, pengelolaan kompos untuk sampah organik serta kegiatan pengurangan sampah.

Untuk mencapai kesuksesan dari setiap kegiatan dalam program pengolahan limbah sampah ini tidak lepas dari peran *stakeholdernya*, program pengolahan limbah sampah tidak hanya berfokus terhadap G2G tapi juga *people to people contact* yang turut melibatkan masyarakat, pemerintah, dan swasta. Pada implementasinya *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan program sesuai dengan yang tercantum di MoU *Sister City* Surabaya – Kitakyushu yang menyebutkan “bahwa dalam kerja sama ini akan melibatkan unsur-unsur lain diluar pemerintah, misalnya *corporate*, maupun akademisi”. Akademisi yang terlibat dalam pelaksanaan program ini ialah akademisi dari universitas yang ada di Kota Surabaya sendiri yaitu dari Institut Teknologi Sepuluh November dan Universitas Airlangga, akademisi berperan untuk memberikan kajian studi untuk penghitungan energi, penghitungan volume *carbon* yang dapat diturunkan, dan penghitungan volume sampah. Untuk *privat sector* disediakan dari pihak Jepang dengan bantuan JICA melalui program JCM (Joint Credit Mechanism) untuk melibatkan perusahaan asing yaitu Nishihara Corporation yang memberikan suntikan bantuan berupa hibah teknis yaitu pembangunan Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo beserta alat-alatnya, serta bantuan mengenai *transfer knowledge* mengenai penanganan permasalahan sampah serta pengelolaannya. Pelatihan yang diberikan oleh Nishihara *Corp* lebih disasarkan kepada pemulung, ada sekitar 10 orang pemulung dari warga setempat yang mana sebelumnya pemulung datang ke tempat penampungan sampah sementara dengan mengais plastik dan segala macam sendiri, menjadi dilatih untuk memilah sampah menggunakan *conveyor* yang berada di Super Depo Sutorejo. Pada pengelolaan sampah, digunakan konsep 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), yang mana sampah yang dipilah yaitu organik dan anorganik, sampah organik yang dapat didaur ulang menjadi kompos dikirim ke rumah *composting* Wonorejo dan sampah anorganik yang masih berpotensi dapat didaur ulang akan dipilah lagi, seperti plastik sehingga memiliki nilai jual kembali

di bank sampah. Sampah yang tidak dapat dipilah sama sekali akan dipres lalu dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).¹⁵

Tabel I. 3 Sampah Terpilah dan Residue dari Super Depo Sutorejo

No	Tahun	Sampah Masuk		Terpilah				Residue	
				Organik		Anorganik (Dapat Didaur Ulang)			
				Gerobak	Kg	Kg	%		
1	2017	17.665	5.625.742	2.573.618	46	567.851	10	2.484.273	44
2	2018	22.941	7.259.546	2.800.511	39	648.865	9	3.810.170	52

Sumber : Seksi Pemanfaat Sampah – DKRTH Surabaya

Perlu digaris bawahi bahwa Super Depo Sutorejo menampung sampah dari 2 (dua) Kelurahan, yaitu Kelurahan Kalisari dan Kelurahan Dukuh Sutorejo. Sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan tabel I.3 bahwa program pengolahan limbah sampah dari hubungan kerja sama sister city Surabaya – Kitakyushu ini memberi dampak positif yang nyata yaitu adanya pengurangan jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), proses pemilahan sampah yang berbasis teknologi hingga tersedianya lapangan pekerjaan khususnya bagi warga sekitar Super Depo Sutorejo. Program pemilahan sampah dan *composting* juga dinilai berhasil dalam sisi *pilot project*, hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan Super Depo di daerah lain hingga total sebanyak 4 Super Depo /tahun 2019, masing-masing yaitu Super Depo Sutorejo, Pemilahan (PDU) Jambangan, Pemilahan Bratang, dan TPS Tambak Osowilangun.¹⁶ Pengembangan pembangunan tempat pemilahan sampah ini akan terus berlanjut pada tahun 2020 yang direncanakan pembangunan Super Depo di Surabaya total sebanyak 6 hingga 8 Super Depo.

Pengelolaan sampah di Kota Surabaya berhasil menyedot perhatian dunia internasional. Pada 29 Oktober 2018, Kota Surabaya berkesempatan menerima kunjungan dari Delegasi *United Nations Environment Programme* (UNEP), pada

¹⁵ Wawancara dengan Bu Rahmasari, Staf Bagian Administrasi Kerja sama Luar Negeri pada tanggal 6 Maret 2020 di kantor Pemerintah Kota Surabaya.

¹⁶ *Ibid.*

kunjungan tersebut UNEP menilai bahwa Kota Surabaya sudah bagus dalam melakukan *best practices* pengelolaan sampah.¹⁷

Adanya keberhasilan tersebut juga dilengkapi dengan kekurang berhasilan. Menurut keterangan dari pihak DKRTH selaku *executing agency* dari program pengolahan limbah sampah menyatakan bahwa saat ini sampah yang masuk ke TPA masih mencapai 40% hingga 50% sehingga belum mencapai sasaran target pengurangan hingga 30%.¹⁸ Kekurang berhasilan yang selanjutnya yaitu berada pada pengolahan kompos yang belum maksimal, kompos yang diolah di Rumah Kompos Wonorejo hanya menghasilkan curah kompos saja, belum menjadi kompos yang siap digunakan. Hal tersebut berbeda dengan Depo Jambangan yang mana sudah dapat mengolah hingga menjadi kompos siap pakai.

Tabel I. 4 Program Pengolahan Limbah Sampah

Tujuan	Kegiatan	Hasil yang Dicapai	Penilaian
Meminimalkan jumlah <i>residue</i> yang dibuang ke TPA untuk memperpanjang umur TPA	<ul style="list-style-type: none"> - pemilahan sampah organik, anorganik dan <i>residue</i> - Pengolahan kompos siap pakai untuk sampah organik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan sampah yang dibuang ke TPA sekitar 50% - Pengolahan kompos menjadi curah kompos 	Kurang Berhasil
Pengembangan usaha di bidang pengelolaan sampah sebagai industri resmi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan sampah hingga 30% sampah yang dibuang ke TPA 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan teknologi - Sampah terpilah menjadi organik dan anorganik - Sebagai lapangan pekerjaan untuk sumber pendapatan warga 	Berhasil

Sumber : data diolah

¹⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Siaran Pers: Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Diapresiasi Dunia Internasional*. Diakses pada 8 April 2020 melalui http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1595; internet.

¹⁸ Wawancara dengan Bu Andini, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah pada tanggal 16 Maret 2020 di kantor DKRTH Kota Surabaya.

Stakeholder terbilang erat berkaitan dengan ekspektasi diandalkan peranannya dalam pelaksanaan program, termuat dalam MoU *Green Sister City* Surabaya – Kitakyushu pada *Article 5 Joint Working Group*, menjelaskan *stakeholder* yang dilibatkan diharapkan memberikan kontribusi yang menyukseskan program pada setiap fokus yang memerlukan keberadaan *stakeholder* tersebut. Namun yang terjadi berdasarkan tujuan program yang belum tercapai menandakan bahwa dimungkinkan adanya kurang sinkronan peran dari setiap stakeholdernya. Hal tersebut bisa terjadi mengingat *stakeholder* memiliki kepentingan masing-masing sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam program ini menimbulkan *stakeholder* yang lebih dominan dan/atau lebih ego yang menyebabkan terjadinya ketidak sinkronan dari setiap *stakeholder* yang terlibat dalam program. Dari sini, muncul pertanyaan apakah *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan program pengolahan limbah sampah ini telah berkontribusi secara maksimal melalui perannya jika dihubungkan dengan data yang dipaparkan sebelumnya bahwa target sasaran program ternyata mengalami kurang berhasil.

Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti merujuk beberapa penelitian terdahulu guna mendapat hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pertama, penelitian oleh Inggang Parawangsa, Universitas Brawijaya, Jurusan Administrasi Bisnis pada *Journal of Applied Business Administration* Volume 2, No 1, pada artikel jurnal yang berjudul “Peran Strategis Penerapan Konsep Sister City Dalam Menciptakan Surabaya Green City”,¹⁹ penelitian tersebut berfokus memberikan gambaran tentang hubungan *sister city* yang dilaksanakan Surabaya – Kitakyushu dalam keberhasilan kerja sama kota *green city*. Penelitian tersebut memberi identifikasi kesamaan antara daerah yang berpotensi dilakukan hubungan kerja sama demi membantu perkembangan daerah masing-masing. Dampak kerja sama yang terjadi dinilai menguntungkan karena dapat menjadi sarana membangun hubungan baik dan mendapatkan pembelajaran mengenai bagaimana tata kota dari Kota Kitakyushu dengan diterapkan di Kota Surabaya. Kekurangan yang ditemukan dalam penelitian tersebut ialah kurangnya pendayagunaan pengembangan kapasitas

¹⁹ Nuralam, Inggang., “Peran Strategis Penerapan Konsep Sister City Dalam Menciptakan Surabaya Green-City”. *Journal of Applied Business Administration* Vol 2, No 1, Maret 2018: 144-151.

tiap *stakeholdernya* antara lain yaitu masyarakat kota, pemerintah daerah, serta pihak swasta. Sedangkan apabila sektor tersebut dikembangkan akan lebih memacu pembangunan serta pertumbuhan daerah/kota masing-masing.

Penelitian kedua yang ditulis oleh Irni Aprilia Dai, S. IP dengan judul “Kerja sama *Sister City* Surabaya – Kitakyushu dalam Pengelolaan Limbah Sampah”.²⁰ Dalam penelitian tersebut, Irni Aprilia Dai berfokus pada faktor-faktor yang mendorong Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan hubungan kerja sama *sister city* dengan Kota Kitakyushu dilihat dari perspektif keilmuan Hubungan Internasional. Belum disebutkan secara mendalam mengenai bagaimana pembagian peran beserta analisis terhadap keterlibatan *stakeholder* dalam menyelenggarakan kerja sama *sister city* tersebut.

Penelitian terakhir yang mendorong terciptanya penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Nadya Cindy Dellavalerin, yang berjudul “*Green Sister City* Surabaya – Kitakyushu (Studi Evaluasi tentang Program Pengelolaan Limbah Sampah)”.²¹ Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini ialah evaluasi *before-after comparisons* yang dibagi dalam 4 aspek yaitu aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek yang tidak diharapkan. Hasil kesimpulan yang didapat ialah adanya kontribusi positif terhadap menyelesaikan permasalahan sampah di Surabaya sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan kerja sama *sister city* antara Surabaya – Kitakyushu merupakan *sister city* yang berhasil. Masih sama dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian dari Nadya Cindy Dellavalerin masih belum dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian ini mengenai analisis *stakeholder* dalam program pengolahan limbah sampah yang merupakan program dari *green sister city* Surabaya-Kitakyushu.

Guna menjelaskan penelitian terdahulu secara lebih rinci, maka peneliti menyajikan pada tabel I.5 berikut.

²⁰ Dai, I.A. “Kerja sama *Sister City* Surabaya-Kitakyushu dalam Pengelolaan Limbah Sampah”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018

²¹ Dellavalerin, N. C. “*Green Sister City* Surabaya-Kitakyushu (Studi Evaluasi tentang Program Pengelolaan Limbah Sampah)”. Skripsi. Universitas Airlangga, 2019.

Tabel I. 5 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Keterkaitan Dengan Penelitian Ini
<p>- Peneliti : Inggang Perwangsa Nuralam</p> <p>- Judul Penelitian : Peran Strategis Penerapan Konsep <i>Siter City</i> Dalam Menciptakan <i>Surabaya Green City</i></p>	<p>Dampak kerja sama yang terjadi dinilai menguntungkan karena dapat menjadi sarana membangun hubungan baik dan mendapatkan pembelajaran mengenai bagaimana tata kota dari Kitakyushu dengan diterapkan di Kota Surabaya.</p>	<p>Adanya kekurangan pendayagunaan dan pengembangan kapasitas tiap <i>stakeholdernya</i>. Dari kekurangan yang ada, maka <i>stakeholder</i> sangat perlu diteliti mengingat keberadaannya merupakan sebuah penentu keberhasilan maupun kegagalan sebuah program.</p>
<p>- Peneliti : Irni Aprilia Dai</p> <p>- Judul Penelitian : Kerja sama <i>Sister City</i> Surabaya-Kitakyushu dalam Pengelolaan Limbah Sampah.</p>	<p>Disebutkan faktor-faktor yang mendorong timbulnya kerja sama <i>sister city</i> dari Pemerintah Kota Surabaya dilihat dari prespektif hubungan internasional.</p>	<p>Belum ada pembahasan lebih dalam tentang peran <i>stakeholdernya</i>. Dalam penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai <i>stakeholder</i> dengan perspektif keilmuan Administrasi Negara.</p>
<p>- Peneliti : Nadya Cindy Dellavalerin</p> <p>- Judul Penelitian : <i>Green Sister City</i> Surabaya-Kitakyushu (Studi Evaluasi tentang Program Pengelolaan Limbah Sampah)</p>	<p><i>Sister city</i> antara Surabaya – Kitakyushu merupakan <i>sister city</i> yang berhasil, dibuktikan dengan adanya kontribusi positif dari program pengolahan limbah sampah dalam menyelesaikan masalah sampah.</p>	<p>Pencapaian dari keberhasilan program pengolahan limbah sampah tidak lepas dari keterlibatan <i>stakeholder</i> yang merupakan kunci dilaksanakannya program, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan yang menganalisis <i>stakeholder</i> dari program pengolahan limbah sampah.</p>

Sumber: data diolah

Berangkat dari studi terdahulu dan berdasarkan fenomena yang berkembang saat ini, terdapat 2 (dua) urgensi penelitian yang menjadi latar belakang pentingnya membahas lebih lanjut mengenai analisis *stakeholder* dalam keberlangsungan program pengolahan limbah sampah, (1) Ketiga penelitian terdahulu yang dijadikan *theoretical problem* pada penelitian ini, belum membahas mendalam mengenai analisis dari *stakeholder*, mengingat *stakeholder* merupakan unsur penting dalam program yang menentukan berhasil atau tidaknya program. (2) Kurangnya literasi atau penelitian yang membahas analisis *stakeholder* dalam program pengolahan limbah sampah dari hubungan kerja sama *sister city* Surabaya – Kitakyushu secara spesifik, sehingga mendorong peneliti untuk lebih menggali fakta empiris yang terjadi di lapangan sebenarnya dengan menggunakan sudut pandang keilmuan Administrasi Negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai analisis *stakeholder* dalam program pengolahan limbah sampah di Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo Surabaya.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana gambaran tentang peran *stakeholder* dalam program pengolahan limbah sampah di Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo?
2. Bagaimana gambaran tentang pengategorian *stakeholder* dalam proses kebijakan program pengolahan limbah sampah di Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo?
3. Bagaimana gambaran tentang hubungan antar *stakeholder* dalam proses kebijakan program pengolahan limbah sampah di Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan pertanyaan penelitian, yakni:

1. Menggambarkan tentang peran *stakeholder* dalam program pengolahan limbah sampah di Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo.
2. Menggambarkan tentang pengategorian *stakeholder* dalam program pengolahan limbah sampah di Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo.
3. Menggambarkan tentang hubungan *stakeholder* dalam program pengolahan limbah sampah.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini mampu memberikan manfaat yang dapat diperoleh baik secara akademis maupun praktis. Manfaat tersebut antara lain:

I.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis sebagai bahan rujukan dalam rangka penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam penerapan ilmu khususnya mengenai analisis *stakeholder* dalam program pengolahan limbah sampah di Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang melihat faktor berbeda antar penelitian dengan lokus yang sama yaitu program pengolahan limbah sampah dari kerja sama *sister city* Surabaya – Kitakyushu. Pada penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada analisis *stakeholder* dengan mendeskripsikan peran serta hubungan antar *stakeholder* dalam pengolahan limbah sampah di Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo.

I.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat akademis, terdapat manfaat praktis yang mana peneliti berharap penelitian ini menjadi salah satu tambahan wawasan bagi masyarakat Kota Surabaya untuk mengetahui analisis *stakeholder* dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang dilakukan dengan cara mewujudkan Surabaya *Green City*.

I.5 Landasan Teori

Untuk dapat memahami mengenai permasalahan dalam penelitian ini, tentunya diperlukan suatu landasan berpikir atau yang disebut dengan landasan

teori. Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

I.5.1 Kebijakan Publik

1.5.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Definisi dari kebijakan publik menurut Chandler & Plano ialah “pemanfaatan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik dan pemerintahan”.²² James E. Anderson juga mengungkapkan definisi dari kebijakan publik sebagai “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a proble or matter of concern*”.²³ Sedangkan menurut Peterson kebijak publik secara umum dapat dilihat sebagai tindakan pemerintah dalam menghadapi masalah dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”, sehingga definisi dari Peterson lebih mengartikan kebijakan publik sebagai aksi pemerintah.²⁴

Mengingat proses dari kebijakan publik memang tidak sederhana sehingga kebijakan publik erat kaitannya dengan aksi kolektif oleh beberapa pihak atau stakeholder. Kay (2006) mengatakan bahwa terdapat beragam keputusan yang dihasilkan oleh beberapa aktor yang tersebar di seluruh organisasi pemerintah dalam tingkatan berbeda, sehingga sangat memungkinkan adanya perbedaan perspektif untuk didapatkan kebijakan publik. Robert R. Meyer dan Ernest Greenwood²⁵ membedakan tingkatan pembuatan keputusan, keputusan tingkat pertama yaitu keputusan birokrat yang bersifat rutin dan berulang – ulang yang mewujud dalam pedoman pelaksanaan atau SOP. Keputusan tingkat kedua adalah keputusan yang lebih kompleks dan jangkauan yang lebih jauh, wujudnya adalah taktik atau strategi. Keputusan tingkat ketiga adalah keputusan yang memiliki jangkauan paling luas, perspektif waktu yang paling lama, dan umumnya

²² Chandler, Ralph C, Plano, dan Jack C. *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons, 1988.

²³ Anderson, J. E. *Pembuatan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1984.

²⁴ Rochyati, W.T. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: PT Revka Media Putra, 2011.

²⁵ *Ibid.* Hlm 2.

memerlukan informasi dan kontemplasi yang paling banyak. Keputusan tingkat ketiga inilah yang dimaksud dengan *Public Policy*.

Dari pemaparan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik benang merah bahwa kebijakan publik adalah usaha yang diadakan dalam rangka mengatasi permasalahan publik dengan cara melibatkan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* dalam proses dari kebijakan publik.

1.5.1.2 Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki tahapan proses yang tidak sederhana, lazimnya terdapat 5 (lima) prosedur yang harus dilewati untuk menjadi analisis yang melahirkan kebijakan, prosedur tersebut yaitu:

1. Definisi (perumusan masalah), tahap ini menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan adanya kebijakan
2. Prediksi (peramalan), tahap ini menyediakan informasi yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga dapat menentukan alternatif atau langkah apa saja yang akan diambil
3. Preskripsi (rekomendasi), setelah mengetahui prediksi yang akan terjadi di masa depan dan menentukan langkah yang akan diambil, pada tahap ini adalah memunculkan kegunaan relatif atau nilai dari konsekuensi dari suatu pemecahan masalah
4. Deskripsi (pemantauan), tahap ini menyediakan informasi tentang konsekuensi masa sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan
5. Evaluasi, tahap ini menginformasikan bahwa adanya hal yang harus diperbaiki maupun ditingkatkan.

Selain prosedur, kebijakan publik memiliki proses yang sangat panjang dan kompleks karena melibatkan banyak variable yang harus dikaji. Menurut Dunn²⁶ proses kebijakan publik dimulai dari (1) penetapan agenda, (2) formulasi kebijakan, (3) adopsi kebijakan publik, (4) implementasi kebijakan, (5) evaluasi kebijakan. Yang mana penjelasan masing-masing poin yaitu:

²⁶ Dunn, William N., ed. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999. Hlm 24-25.

1. Penetapan Agenda

Pada tahap ini pemerintah mulai mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan kemudian membuat agenda terkait solusi dan pemecahan terhadap masalah-masalah tersebut.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan atas masalah-masalah dan memilih alternatif yang dikembangkan untuk menjadi sebuah kebijakan serta menentukan pihak-pihak yang terkait dalam proses pembuatan kebijakan tersebut

3. Adopsi Kebijakan

Proses ini menjadikan sebuah kebijakan dan berbagai alternatif yang ditawarkan untuk dapat ditetapkan dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antar lembaga dan atau keputusan peradilan

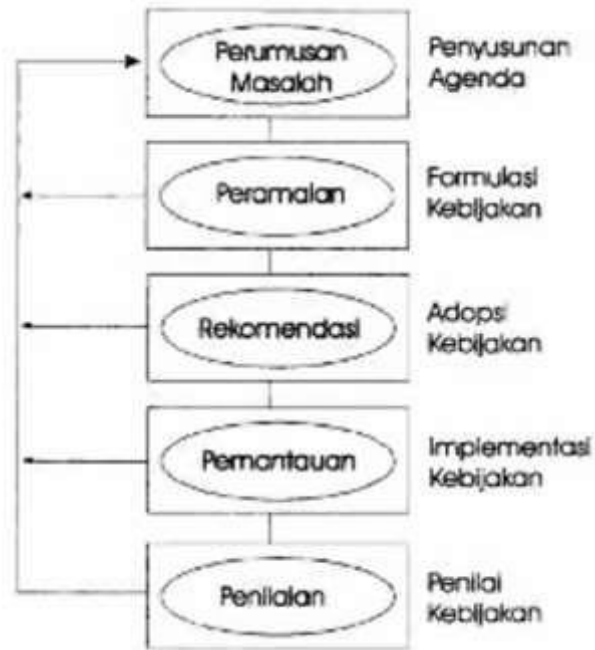
4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap dimana alternatif yang telah ditetapkan diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Dilaksanakan oleh unit-unit administratif dengan memobilisasi sumber daya. Tanpa implementasi suatu kebijakan akan sia-sia. Implementasi merupakan rantai yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang diharapkan

5. Evaluasi Kebijakan

Tahap ini digunakan untuk menguji kemampuan kebijakan dalam mengatasi tujuan dibentuknya kebijakan yaitu untuk mengatasi permasalahan publik. Pada tahap ini juga menggambarkan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan yang dapat menentukan masa depan dari kebijakan tersebut.

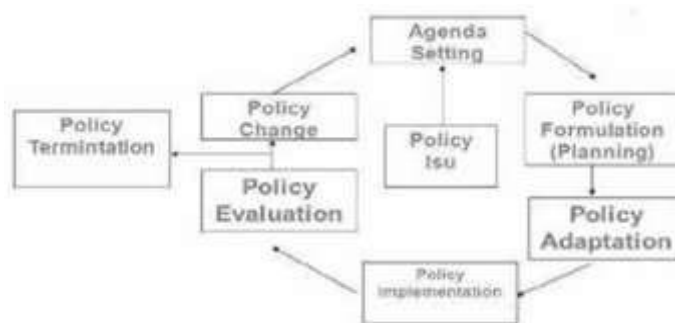
Antara prosedur dan proses kebijakan publik memiliki kedekatan yang mana dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar I. 1 Kedekatan Analisis Kebijakan dengan Tipe Pembuatan Kebijakan

Sumber: Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua²⁷

Kebijakan publik memiliki siklus yang berulang, yang mana ketika kebijakan telah melalui proses kebijakan hingga tahap evaluasi dan menghasilkan output, maka kebijakan publik memiliki 2 (dua) pilihan, yaitu dilanjutkan dengan diperbaiki kekurangan dan kelebihanannya atau diberhentikan. Ketika dipilih untuk dilanjutkan maka kebijakan publik kembali melalui prosesnya. Lebih jelas digambarkan sebagai berikut.



Gambar I. 2 Siklus Kebijakan Publik

Sumber: Gupta (2001) dalam Madani, Dimensi Interaksi aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik²⁸

²⁷ Dunn, William N., ed. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.

²⁸ Madani, Muhlis. *Dimensi Interaksi aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Hlm 29.

Dalam konteks program pengolahan limbah sampah dibutuhkan juga proses kebijakan seperti penyusunan agenda hingga evaluasi program, yang mana dalam proses tersebut dibutuhkan pihak-pihak yang disebut *stakeholder*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *stakeholder* disini memiliki peran untuk mempertimbangkan penilaian dalam menjalankan proses kebijakan publik dari program pengolahan limbah sampah.

1.5.1.3 *Stakeholder* dalam Kebijakan Publik

Istilah *stakeholder* atau pemangku kepentingan pertama kali muncul dari penelitian yang berjudul *Strategic Management a Stakeholder Approach* yang ditulis oleh Freeman terbitan Stanford Research Institute pada tahun 1984. Menurut Freeman, *stakeholder is any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization's objective*. Sehingga hal ini dapat berarti bahwa *stakeholder*, baik seorang individu ataupun kelompok akan selalu terlibat dan berpartisipasi dalam proses dari kebijakan publik.

Pernyataan Brysson tersebut menyatakan bahwa *stakeholder* adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki perhatian terhadap sumberdaya atau hasil (output) organisasi atau dipengaruhi oleh hasil tersebut. Hal ini membuat peran *stakeholder* memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Mengenai derajat relevansi *stakeholder* tentang pengaruh besar kecilnya *stakeholder* diukur kekuasaan, legitimasi dan urgensi. Kekuasaan merupakan derajat kemampuan *stakeholder* untuk mempengaruhi perusahaan atau organisasi melalui penggunaan unsur pemaksaan, insentif maupun normatif. sedangkan legitimasi dan urgensi lebih mengarah kepada pelibatan *stakeholder* dalam berbagai program maupun pembuatan kebijakan. Soemato (2007) mengategorikan *stakeholder* menjadi 4 kelompok yaitu : pemerintah (*Government*), sektor privat, (*private sector*), Lembaga Swadaya Masyarakat/ LSM (*Non-Governmental Organizations/NGOs*) dan Masyarakat (*Community*).

Berdasarkan dari pemaparan sebelumnya, jika dianalisis mengenai proses kebijakan publik dari program pengolahan limbah sampah di Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo, *stakeholder* yang terlibat meliputi kelompok pemerintah (*Government*) adalah Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Kitakyushu, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) dan Badan

Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya. Sedangkan dari sektor Swasta (*private sectore*) yaitu Nishihara Corporation, dan dari kelompok masyarakat yaitu masyarakat pekerja di Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo, media massa, dan akademisi.

I.5.2 Stakeholder

1.5.2.1 Definisi Stakeholder

Istilah *stakeholder* terdiri dari sebuah frasa yang terbentuk dari dua buah kata, yaitu “*stake*” dan “*holder*”. Secara umum, kata “*stake*” diterjemahkan sebagai “kepentingan”, sedangkan kata “*holder*” diartikan sebagai “pemegang”. Sehingga dapat dikatakan *stakeholder* artinya adalah pemegang kepentingan atau pemangku kepentingan.²⁹ Sedangkan menurut Rhenald Kasali dalam bukunya *Manajemen Public Relation*, *stakeholder* adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan.³⁰

Dalam suatu kebijakan, *stakeholder* merupakan istilah yang tidak asing lagi, *stakeholder* sendiri sering digunakan oleh lembaga publik dalam proses pengambilan keputusan hingga implementasinya. Berbagai ahli berpendapat mengenai definisi *stakeholder*, antara lain seperti Freeman (1984) yang mendefinisikan *stakeholder* sebagai: “*any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives*.”³¹ Atau dapat diartikan bahwa adalah sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Definisi lain datang dari Biset yang secara singkat mendefinisikan *stakeholder* adalah orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Sedangkan Grimble and Wellard melihat *stakeholder* dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki.³² Benang merah dari beberapa definisi ahli tersebut ialah bahwa *stakeholder* merupakan kelompok keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dasar

²⁹ Estaswara, Helpris. *Stakeholder Relation*. Jakarta: Universitas Pancasila, 2010. Hlm. 2.

³⁰ Kasali, Rhenald. *Manajemen Public Relation: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1994. Hlm. 63.

³¹ R.E. Freeman. *Strategic Management: A Stakeholders Approach*. Fitman, Boston, 1984. Hlm.37.

³² Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility; Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Hlm. 112.

dari strategi *stakeholder* sendiri ialah pandangan bahwa komunitas dan korporat memiliki hubungan yang saling tergantung satu sama lain membentuk masyarakat luas, sehingga dapat berjalan secara fungsional.

Maka dari itu, jika berbicara mengenai teori *stakeholder* berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Pertama, teori *stakeholder* menjelaskan bahwa *stakeholder* merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tertentu suatu organisasi dengan lingkungan, *stakeholder* memiliki sifat saling mempengaruhi yang kompleks dan dinamis.

Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholdernya*.³³

Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis, yang tujuannya ialah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok eksternal sehingga dapat mengembangkan keunggulan kompetitif.³⁴ Dengan memiliki premis dasar bahwa kuat dan lemahnya hubungan korporasi dengan *stakeholder* merupakan pengaruh besar yang menentukan hubungan. Semakin kuat hubungan korporasi maka semakin baik bisnis korporasi, dan sebaliknya, semakin lemah hubungan korporasi maka semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para *stakeholder* adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerja sama.

Teori *stakeholder* berpendapat bahwa sebuah korporat merupakan entitas yang tidak dapat beroperasi jika hanya mementingkan kepentingannya sendiri, melainkan harus juga memberi manfaat bagi *stakeholdernya*. Sehingga keberadaan *stakeholder* sangat mempengaruhi untuk memberikan dukungan bagi kelangsungan dan kesuksesan suatu korporat tersebut. Pada saat krisis menyerang korporat/perusahaan/organisasi, pengelola hubungan dengan para *stakeholder* memegang peranan sangat penting. Kesalahan dalam mengelola hubungan dengan *stakeholder* pada saat krisis akan berakibat buruk pada suatu korporat/perusahaan/organisasi tersebut. Semakin *powerful stakeholder*, maka

³³ Marzully Nur dan Denies Priantinah. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Jurnal Nominal", Vol I, No I, 2012. Hlm. 24.

³⁴ Totok Mardikanto. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. Bandung: Alfabeta, 2014. Hlm. 68.

semakin besar usaha korporat untuk beradaptasi. Dialog antara korporat dengan *stakeholdernya* dianggap sebagai pengungkapan sosial.³⁵

1.5.2.2 Analisis *Stakeholder*

*“These can be categorized as methods used for identifying stakeholders, differentiating between and categorizing stakeholders and investigating relationships between stakeholder provides a summary description of each of the methods covered in the typology, including details of the resources required, level of stakeholder participation, and their strengths and weakness”.*³⁶

Pernyataan Redd, dkk yang diadopsi dari Grimble (1998) tersebut dapat dikerucutkan bahwa hubungan antara kepentingan dan kekuatan para pihak dapat dipetakan menggunakan analisis *stakeholder*, yang dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait beserta kepentingannya
2. Mengategorikan atau mengelompokkan pihak-pihak terkait
3. Mendalami hubungan antara pihak-pihak terkait

Menurut Brysson³⁷ analisis *stakeholder* digunakan untuk menghindari kebijakan yang gagal karena pengambil kebijakan mengetahui kepentingan dan informasi dari *stakeholder* kunci, menghubungkan banyak pihak yang terlibat secara global sebagai aspek penting dalam pemecah masalah, membantu keberhasilan pencapaian tujuan dengan memberikan kontribusi penting untuk menciptakan nilai melalui dampak dan fungsi atau kegiatan dalam strategi pengelolaan.

³⁵ Yunus Handoko. “Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis”. Jurnal JIBEKA, Vol.8 No.2, 2014. Hlm. 74.

³⁶ Reed, M.S., Graves, A., Dandy N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris J., Prell, C., Quinn, C.H., Stringer, LC. “Who’s in and why? A typology of *stakeholder* analysis method for natural resource management”. Journal of Environmental Management, 90, 2009: 1933-1949.

³⁷ Bryson, John M. “What Do When *Stakeholders* Matter : *Stakeholder* Identification and Analysis Techniques”. Minneapolis: Hubbert H. Humphrey Institute of Public Affairs, 2004.

1.5.2.2.1 Identifikasi *Stakeholder*

Identifikasi *stakeholder* merupakan sebuah langkah mencari dan menemukan untuk mengetahui *stakeholder*, dalam penelitian ini yakni *stakeholder* yang terlibat dalam program pengolahan limbah sampah. Menurut Reed, dalam mengidentifikasi *stakeholder* dapat dilakukan dengan membuat cek list secara pribadi dengan mengidentifikasi siapa saja *stakeholder* yang terlibat, berpengaruh, dan terdampak dengan adanya sebuah kebijakan, program ataupun kegiatan utama. Sehubungan dengan penelitian ini, *stakeholder* yang terlibat dalam program pengolahan limbah sampah akan diidentifikasi dengan mengacu pada perspektif *governance*.

Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor pemerintah dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.³⁸ Dalam proses demokratisasi, *governance* sering mengilhami para aktivis pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi aktor dan lembaga di luar pemerintah sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara negara, masyarakat, dan pihak swasta. Adanya pembagian peran yang seimbang dan saling melengkapi antar ketiga unsur tersebut bukan hanya memungkinkan adanya *check and balance* tetapi juga menghasilkan sinergi yang baik antar ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.³⁹ Berangkat dari konsep *governance* yang mengelompokkan unsur-unsur *stakeholder* ke dalam 3 kategori, maka dari itu *stakeholder* yang diidentifikasi pada penelitian ini yaitu: Pemerintah (*Government*), Masyarakat (*Civil Society*), dan Swasta (*Privat Sector*).⁴⁰

³⁸ J. Widodo. *Good Governance : Telaan dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia, 2001. Hlm 18.

³⁹ Dwi yanto, A. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008. Hlm 18.

⁴⁰ Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Cetakan Kedua*. Bandung: Mandar Maju, 2004. Hlm. 38

Tabel I. 6 Peta *Governance* di Level Daerah

Elemen <i>Governance</i>	<i>Stakeholder</i>	Arena Peran	Isu Relasional
Pemerintah (<i>Government</i>)	Pemerintah Kota Surabaya Bagian Administrasi Kerja	- Regulasi	Akuntabilitas, responsivitas, pengembangan kapasitas
	Sama; Pemerintah Kota	- Evaluasi	
	Kitakyushu; Dinas	- Pengelolaan program	
	Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau; Badan Perencanaan	- Pengelolaan <i>Stakeholder</i> lainnya	
	Pembangunan Kota Surabaya		
Masyarakat (<i>Civil Society</i>)	Masyarakat sekitar Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo; Akademisi; Media Massa	- Keberdayaan - Jaringan sosial	Partisipasi (<i>voice access</i> dan <i>control</i>)
	Swasta (<i>Privat Sector</i>)	Nishihara Corporation	

Sumber: Eko & Dwipayana (2003: 23)⁴¹

1. Pemerintah (*Government*)

Pemerintah (*Government*) memiliki konsepsi terkait kegiatan kenegaraan. Pemerintah (*Government*) memiliki peran untuk memberi proteksi, menyelenggarakan pembangunan melaksanakan fungsi fasilitasi, regulasi, serta distribusi. Dalam hal program pengolahan limbah sampah, pihak pemerintah adalah pemerintah tingkat II yaitu lingkup Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, peran utama dari pemerintah daerah tingkat II, antara lain: a) merumuskan program, kebijakan operasional dan kondisi perencanaan dan pelaksanaan program; b) mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam mempersiapkan masterplan serta pelaksanaan program; c) menumbuhkembangkan kelembagaan, sarana prasarana pendukung program. Sebagai pemerintah daerah tingkat II yang biasanya diwakili oleh Pemerintah Kota beserta dinas sektoral atau instansi terkait, harus mampu

⁴¹ Dwipayana & Sutoro, E. *Membangun good governance di desa*. Yogyakarta: IRE Press, 2003. Hlm 23.

memahami dan mengetahui tentang seluruh aspek-aspek dari program, serta dapat mewujudkan koordinasi dan keterkaitan yang sinergis antara pihak yang berkepentingan dalam suatu program.

2. Masyarakat (*Civil Society*)

Masyarakat (*Civil Society*) merupakan kelompok yang dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Masyarakat (*Civil Society*) dalam program pengolahan limbah sampah dibedakan ke dalam 3 (tiga) pihak.

- a. Akademisi yang berperan sebagai *center of excellence* yang menjadi mitra pemerintah. Ide-ide mereka seringkali didiskusikan oleh pemerintah atau birokrat yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Pada hampir semua kasus perubahan kebijakan, ada banyak asal usul perubahan dan berbagai motivasi bagi pejabat pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan. Namun perlu dicatat, peran akademisi dalam proses kebijakan bukanlah sebagai pihak yang mengusulkan atau menentukan agenda pemerintah tetapi lebih kepada penyediaan alternatif kepada pemerintah. Pemerintah mungkin akan membutuhkan saran dari mereka terkait dengan masalah yang menjadi perhatiannya. Dan sering kali pembuat kebijakan di pemerintahan paling banyak mendengarkan akademisi ketika analisis dan proposal mereka terkait langsung dengan masalah yang sudah menjadi perhatian para pejabat.⁴² Akademisi dari perguruan tinggi diharapkan menjadi soko guru bagi pengembangan program.
- b. Pihak selanjutnya yaitu media massa, media massa merupakan aktor yang dapat menggiring opini dan pandangan masyarakat dan juga pemerintah, sehingga memiliki peran terhadap kontrol sosial. Media massa memiliki kekuatan komunikasi yang sangat menentukan dalam penyampaian dan penyebaran informasi. Perhatian publik akan suatu masalah akan mengikuti jejak liputan dari media massa tentang masalah tersebut dan akan membentuk opini masyarakat bahwa masalah tersebutlah yang paling

⁴² Kingdon, John. W. *Agendas, Alternatives, And Public Policies, Second Edition*. USA: Pearson, 2013. Hal 55 - 56

penting. Pengaruh dari media massa bersifat tidak langsung meskipun cukup signifikan terhadap preferensi publik maupun privat dalam hal identifikasi masalah publik.^{43 44}

- c. Pihak terakhir yaitu masyarakat lokal sebagai sasaran program, pola yang ditimbulkan oleh masyarakat lokal memiliki pengaruh besar terhadap suatu program. Masyarakat lokal sendiri memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan melalui opininya. Dari opini masyarakat lokal mampu digunakan untuk mendorong Pemerintah untuk mengambil suatu tindakan.⁴⁵

3. Swasta (*Privat Sector*)

Swasta (*Privat Sector*) merupakan pelaku sektor yang menjalankan interaksi dalam system pasar, seperti: industri,, perdagangan, perbankan, koperasi, dan kegiatan sektor informal lainnya. Swasta (*Privat Sector*) memungkinkan berpengaruh besar pada kasus tertentu. Dalam konteks penelitian ini, kelompok swasta (*privat sector*) termasuk yang memiliki kepentingan dan mencoba melakukan tawar-menawar dengan pemerintah karena kelompok ini akan selalu berusaha memaksimalkan *profit* (keuntungan) mereka dengan melakukan ekspansi dan mewarkan sesuatu kepada pemerintah agar tujuan mereka terlaksana. Peran swasta (*privat sector*) memiliki potensi untuk mempromosikan atau mengikis kesejahteraan sosial. Adanya peran dari kelompok kepentingan bisnis juga dapat menguntungkan pemerintah melalui pendanaan yang mereka berikan untuk beberapa program atau kegiatan pemerintah. Bentuk kekuatan ekonomi semacam ini merepresentasikan bagaimana peran dari kelompok swasta (*privat sector*) dapat mempengaruhi formulasi maupun implementasi kebijakan.⁴⁶

⁴³ *Ibid.*, Hal. 58

⁴⁴ Howlett, Michael, M. Ramesh, Anthony Perl. *Studying Public Policy*. Canada : Oxford University Press, 2009. Hal. 74

⁴⁵ Kingdon, John. W. *Agendas, Alternatives, And Public Policies, Second Edition*. USA: Pearson, 2013. *Op cit*. Hal 65

⁴⁶ Chikowore, Andrew Itai. "Advocacy Coalition Framework as an ActorCentred Approach to Policy Formulation and Implementation". Paper Prepared for the International Workshop on Public Policy, Pittsburgh/PA, 26-28 June 2018. Hal. 8

Setelah *stakeholder* yang terlibat nantinya teridentifikasi, *stakeholder* tersebut dapat dibedakan dalam 3 jenis kelompok⁴⁷, yaitu:

1. *Primary stakeholders*

Kelompok *primary stakeholder* memiliki keterkaitan secara langsung pada kepentingan suatu kebijakan, kegiatan, program atau proyek tertentu. Maka dari itu, *primary stakeholder* merupakan penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. *Primary stakeholder* terdiri dari: (a) Masyarakat, Dalam pelaksanaan suatu program pastinya akan memiliki sebuah keadaan yang berubah, baik bersifat buruk maupun baik. Dalam keadaan tersebutlah mereka yang terkena dampak atau manfaat secara langsung dari suatu kegiatan tertentu ialah masyarakat. (b) Lembaga/badan publik, Lembaga publik bersifat sebagai pihak manager publik, yang mana merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.

2. *Secondary stakeholders*

Kelompok *secondary stakeholder* tidak memiliki keterkaitan secara langsung pada kepentingan suatu kebijakan, kegiatan, program atau proyek tertentu, namun memiliki kehadiran yang turut berpengaruh dikarenakan *secondary stakeholder* memiliki kepedulian (*concern*) antara sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. *Secondary stakeholder* terdiri dari: (a) Lembaga atau aparat pemerintah yang tidak memiliki tanggungjawab secara langsung. (b) Lembaga atau aparat pemerintah yang terkait dengan isu namun tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan. (c) Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi massa setempat yang memiliki concern yang sejalan dengan kegiatan terkait. (d) Perguruan tinggi atau akademisi yang memiliki suara yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. (e) Badan usaha atau pengusaha yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan. (f) Pers atau media yang bersifat memberikan pengaruh pada masyarakat.

⁴⁷ ODA. *Guidance Note on How to do Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmes*. Social Development Department. Overseas Development Administration, 1995. Diakses pada 4 Februari 2020 melalui <http://www.euforic.org/gb/stake1.htm#intro>; internet

3. *Key stakeholders*

Kelompok *key stakeholder* merupakan kelompok legal yang memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Mereka antara lain adalah unsur eksekutif sesuai levelnya.

1.5.2.2.1.1 *Peran Stakeholder*

Kata peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Masih di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi serupa disampaikan oleh Poerwadarminta, yang mendefinisikan peran sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dalam suatu peristiwa.⁴⁸

Dalam konsep peran, Soekanto⁴⁹ mengartikan peran merupakan aspek dinamis dari status (kedudukan), apabila seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan ia telah menjalankan suatu peran. Pada hakikatnya, peran dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku yang dilator belakangi oleh suatu jabatan tertentu. Lebih lanjut, Soekanto membedakan peran menjadi 2 (dua), yaitu peran normatif dan peran ideal. Peran normatif berkaitan dengan tugas dan kewajiban, sedangkan peran ideal merupakan peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.⁵⁰

Dari definisi yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku dari seseorang atau kelompok tentang pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak sesuai keberadaannya pada sebuah kegiatan, jika dikaitkan dengan penelitian ini adalah sebuah program.

Peran dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas *stakeholder*. Sehubungan dengan penelitian ini yang menganut perspektif *governance*, *stakeholder* dalam program pengolahan limbah sampah akan dibagi menjadi 3 (tiga) elemen, yaitu Pemerintah (*Government*), Masyarakat (*Civil Society*), dan Swasta (*Privat Sector*).

⁴⁸ Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1995. Hal 571

⁴⁹ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali, 2002. Hal 243

⁵⁰ *Ibid.* Hal 220

Untuk menganalisis peran dari *stakeholder*, pada penelitian ini menggunakan klasifikasi peran menurut Nugroho *et. al.*,⁵¹ yaitu:

15.2.2.1.1.1. *Policy creator*

Policy creator yaitu *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. *Policy creator* berperan utama dalam membuat suatu kebijakan dan mengevaluasinya. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dari berjalannya suatu program. Melalui kebijakan program, *stakeholder policy creator* dapat menciptakan lingkungan yang kondusif serta stabil bagi program.

Identifikasi peran *stakeholder* yang kaitannya dengan perspektif *governance* dalam *policy creator* ini adalah pemerintah (*government*), baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dampak dari peran pemerintah ini sangat penting karena bersifat mengikat dan melibatkan masyarakat secara luas. Peran pemerintah adalah mutlak untuk membuat suatu kebijakan mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi dengan pertimbangan yang jelas karena dampaknya kepada masyarakat sebagai penerima program baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵²

15.2.2.1.1.2. *Coordinator*

Coordinator yaitu *stakeholder* yang berperan mengoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat. *Stakeholder coordinator* diharapkan mampu menghubungkan antar sumber-sumber strategis yang terkait untuk memperlancar berjalannya suatu program.

Kaitannya dengan perspektif *governance*, peran *stakeholder* dalam konteks *coordinator* ini adalah pihak dari pemerintah atau masyarakat yang memiliki keterlibatan dengan organisasi publik dan mempunyai pengaruh bagi masyarakat. Peran *coordinator* ini biasanya telah disepakati oleh setiap *stakeholder* yang terlibat

⁵¹ Nugroho, Hermawan Cahyo; Soesilo Zauhar; dan Suryadi. “Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitas di Kabupaten Nganjuk”. *Jurnal J-PAL*, 5(I), 2014: 16 – 17

⁵² Karim, Rahman, Berawi, Jaapar. *A Review On The Issues and Strategies of Stakeholders Management in Contructions and Research Associastion (MICRA) Meeting and Convergence*. University of Malay, 2007. Hal 8

dengan membuat struktur dan tugas yang jelas agar mampu mengkoordinasi tiap *stakeholder* dalam suatu program.⁵³

15.2.2.1.1.3. *Fasilitator*

Fasilitator yaitu *stakeholder* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran dari program. *Stakeholder* yang termasuk *fasilitator* dituntut untuk mampu mengantarkan program kepada sasaran yang dituju, dengan memberikan pelayanan teknis, material, serta intelektual.

Peran *stakeholder* dalam klasifikasi peran dalam konteks *fasilitator* ini erat kaitannya dengan pihak pemerintah dalam perspektif *governance*. *Stakeholder fasilitator* ini dapat berupa dari satu organisasi pemerintah atau gabungan dari beberapa instansi pemerintah yang bekerja secara kerja sama dalam satuan kelompok kerja yang telah disepakati oleh setiap *stakeholder* yang terlibat. Peran *fasilitator* ini sangat penting, dikarenakan berhubungan dengan implementasi program yang berkomunikasi langsung oleh masyarakat sebagai penerima program.

15.2.2.1.1.4. *Implementor*

Implementor yaitu *stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran. *Implementor* bertanggung jawab sebagai garda terdepan yang membawa program kearah yang telah ditentukan, dengan langkah atau cara yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Kaitannya dengan perspektif *governance* dalam konteks *implementor* ini adalah pihak pemerintah maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran penerima program. Dalam hal ini menjadi sangat penting karena sebagai indikator baik atau tidaknya program atau dengan kata lain sesuai atau tidaknya dengan tujuan program yang telah ditentukan.

15.2.2.1.1.5. *Akselerator*

Akselerator yaitu *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

⁵³ *Ibid.*

Akselerator mampu memberikan kontribusi pada suatu program agar lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini erat kaitannya dengan pihak *privat* atau swasta yang merupakan pihak di luar pemerintah yang mengacu pada perspektif *governance*, namun tidak menutup kemungkinan juga dari pihak masyarakat yang bertugas mempercepat program. Pihak privat dalam hal ini sebagai pihak yang membantu pemerintah dalam hal penyediaan sumber daya finansial, fisik, teknologi, atau hal-hal lain yang telah disepakati oleh *stakeholder* yang terlibat itu sendiri. Sedangkan pihak masyarakat ialah pihak yang dapat memberikan solusi atau langkah yang dapat diambil para pembuat maupun pelaksana kebijakan yang berwenang.

1.5.2.2.1.2 Dampak Stakeholder

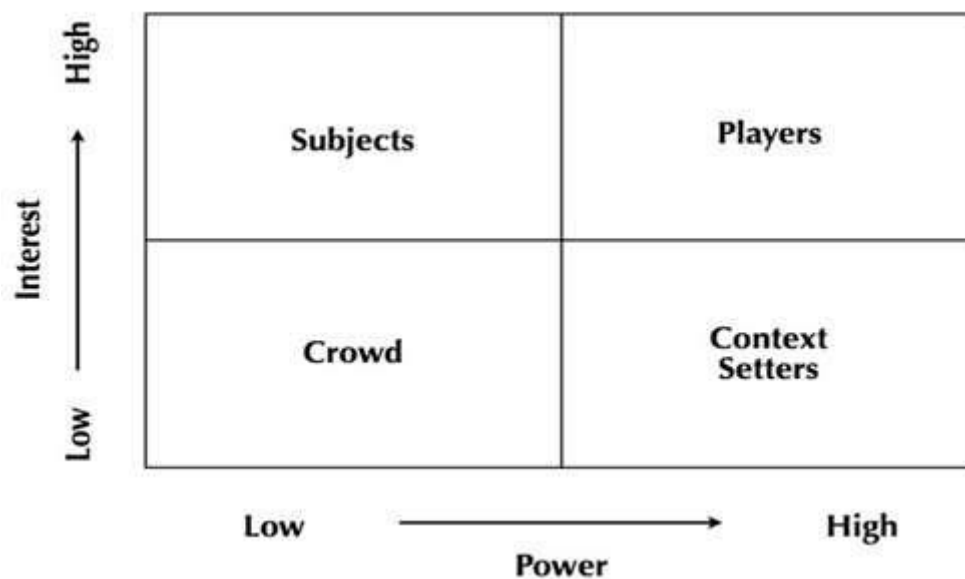
Menurut KBBI, dampak memiliki pengertian yaitu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Secara sederhana, dampak diartikan sebagai pengaruh dan akibat. Dampak merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan suatu kegiatan atau program, yang mana dampak akan dirasakan oleh elemen dari kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan penelitian ini, dampak akan dikaitkan dengan keberadaan *stakeholder* dalam program pengolahan limbah sampah. Dampak dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

- a. Terdampak Langsung, yaitu *stakeholder* yang bersentuhan langsung dengan program sehingga mendapatkan pengaruh atau akibat dari pencapaian sebuah program secara langsung.
- b. Terdampak Tidak Langsung, yaitu *stakeholder* yang lebih berperan pada urusan belakang layar dari program, seperti yang berkaitan dengan kebijakan. Sehingga dampak yang dirasakan ketika pencapaian program akan berdampak pada kebijakan tersebut.
- c. Tidak Terdampak tapi Peduli, yaitu *stakeholder* yang sama sekali tidak mendapatkan pengaruh maupun akibat dari pencapaian sebuah program, namun dalam proses program, *stakeholder* kelompok ini ikut memberikan sumbangsih yang dibutuhkan program.

1.5.2.2.2 Pengategorian *Stakeholder*

Dalam penelitian ini, untuk mengklasifikasi atau mengategorikan *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan kekuatannya, digunakan metode yang mengacu pada serangkaian analisis yang dilakukan Redd *et. al.*, yang mana juga menggunakan beberapa gabungan matriks yang telah disusun oleh Fran Ackerman dan Colin Eden. Klasifikasi dan mengategorikan *stakeholder* dilakukan pada matriks dua kali dua yang didalamnya terdapat kuadran atau kelompok yang dipetakan sesuai kepentingan (*interest*) pada suatu kegiatan dan kekuatan (*power*) yang dimiliki dalam mempengaruhi suatu kegiatan tersebut.



Bagan I. 1 Matriks Analisis Peran *Stakeholder*

Sumber: Eden & Ackerman (2011)⁵⁴

Dalam matriks tersebut digambarkan dengan maksud tersendiri dari tiap posisi tergantung tingkat kepentingan dan kekuatan atas peranan masing-masing *stakeholder*. Penjelasan rinci sebagai berikut:

1. *Context setter*, adalah pihak *stakeholder* dengan kekuatan yang tinggi, namun memiliki tingkat kepentingan yang rendah. Sehingga *stakeholder* jenis ini tinggi resiko dan harus dipantau dalam proses pelaksanaan kebijakan.

⁵⁴ Eden, C. & Ackermann, F. "Strategic Management of *Stakeholders*: Theory and Practice". Elsevier: Long Range Planning Journal Vol (44), 2011: 179-196.

Stakeholder yang termasuk dalam kategori *stakeholder context setter* memiliki kewenangan penuh dalam membuat suatu kebijakan serta mampu memfasilitasi implementasi kebijakan tersebut dan mempengaruhi pihak lain dalam perumusan atau pembuatan kebijakan yang dimaksudkan sebagai tingkat pengaruh yang tinggi dalam tabel posisi kategori *stakeholder*. Kemudian maksud dari tingkat kepentingan yang rendah adalah *stakeholder* tersebut tidak memiliki harapan, aspirasi, maupun manfaat potensial dari terwujudnya suatu kebijakan.

2. *Players*, adalah pihak *stakeholder* dengan kekuatan yang tinggi, dan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Jenis *stakeholder* ini bersifat aktif terlibat dalam berjalannya kebijakan.

Kategori *stakeholder players* ini dalam hal tingkat kekuatan yang tinggi maksudnya adalah memiliki kewenangan yang tinggi dalam membuat suatu kebijakan serta mampu memfasilitasi implementasi kebijakan tersebut dan mempengaruhi pihak lain dalam perumusan atau pembuatan kebijakan. Sedangkan tingkat kepentingan yang tinggi maksudnya adalah *stakeholder* tersebut memiliki harapan, aspirasi, dan manfaat potensial yang tinggi pula atas terselenggarakannya suatu kebijakan.

3. *Crowd*, adalah pihak *stakeholder* dengan kekuatan yang lemah serta tingkat kepentingan yang lemah. Keberadaan dari *stakeholder* jenis *crowd* sebenarnya mempengaruhi hasil yang diinginkan namun dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. *Stakeholder* ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan.

Kategori *stakeholder* yang termasuk dalam tabel *stakeholder crowd* memiliki tingkat kekuatan rendah yang artinya tidak memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan, tidak mampu memfasilitasi implementasi kebijakan maupun mempengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan. Sedangkan maksud dari tingkat kepentingan yang rendah adalah *stakeholder* ini tidak memiliki harapan, aspirasi, maupun keuntungan potensial atas terwujudnya kebijakan.

4. *Subject*, adalah pihak *stakeholder* dengan kekuatan yang lemah, namun memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. *Stakeholder* ini memiliki

keberadaan yang mendukung tetapi kapasitas terhadap dampak terhitung kurang signifikan. *Stakeholder* ini bisa saja berpengaruh jika membentuk aliansi dengan *stakeholder* lain.

Stakeholder ini memiliki tingkat kekuatan yang rendah, maksudnya adalah tidak memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan, tidak mampu memfasilitasi implementasi kebijakan maupun mempengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan. Kemudian *stakeholder* subject memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, maksudnya yaitu memiliki harapan, aspirasi, dan manfaat potensial yang tinggi atas terwujudnya kebijakan.

Menurut Grimble, kepentingan dan agenda *stakeholder* dapat dilihat dari identifikasi kelompok kepentingan yang terdiri dari kepentingan *stakeholder*, dampak potensial, tingkat kepentingan relatif dan kekuatan mempengaruhi dari suatu kelompok.⁵⁵ Pada penelitian ini, analisis digunakan untuk menentukan kekuatan *stakeholder* dilihat berdasarkan peran *stakeholder* dalam perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Tingkat kepentingan dan kekuatan *stakeholder* diklasifikasikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi menggunakan kriteria yang mengacu pada kriteria derajat kepentingan dari Grimble,⁵⁶ ODA⁵⁷ dan Eden & Eckerman.

1.5.2.2.2.1 Derajat Kepentingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepentingan berarti golongan atau kelompok. Sehingga kepentingan erat berkaitan dengan komunikasi antara golongan per golongan.

Sebagaimana yang dilakukan Lienert *et. al.*, pada penelitian ini analisis *stakeholder* menggunakan kategori kepentingan sosial, teknis, ekonomi dan lingkungan dalam proses terlaksananya program pengolahan limbah sampah.⁵⁸

⁵⁵ Grimble, R. *Stakeholder methodologies in natural resource management*. UK: Natural Resource Institute, 1998.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ ODA., 1995.. *Loc. Cit.*

⁵⁸ Lienert, J., Schnetzer, F., Ingold, K. “*Stakeholder analysis combined with social network analysis provides finegrained insights into water infrastructure planning processes*”. *Journal of Environmental Management* 125, 2013: 134-148.

1. Kepentingan Sosial, merupakan kepentingan yang mengarah pada kepentingan masyarakat atau kehidupan orang banyak. Pihak yang memiliki kepentingan ini menempatkan diri untuk peduli dengan kebutuhan masyarakat atau orang banyak.
2. Kepentingan Teknis, yaitu kepentingan yang peduli mengenai dasar cara bekerja program atau bagaimana sebuah program dijalankan. Teknis berfungsi untuk menjadi pedoman arah dari suatu program.
3. Kepentingan Ekonomi, merupakan kepentingan yang melingkupi aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi.
4. Kepentingan Lingkungan, adalah kepentingan yang meliputi kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energy surya, dan mineral, serta flora dan fauna.

Derajat kepentingan dari *stakeholder* sangat penting untuk dipetakan karena berguna untuk menjadi acuan mengategorikan *stakeholder* ke dalam posisi kuadran. Kepentingan yang menjadi harapan dari masing-masing *stakeholder* diorganisir kemudian dianalisis derajat kepentingannya. Dalam proses kebijakan dari program pengolahan limbah sampah ada beberapa kepentingan, harapan, dan lain sebagainya. Berikut klasifikasinya:

- Rendah: Tidak memiliki harapan, aspirasi dan manfaat potensial atas terwujudnya kebijakan
- Sedang: Memiliki harapan dan aspirasi tetapi tidak menerima manfaat potensial secara langsung dari terwujudnya kebijakan
- Tinggi: Memiliki harapan, aspirasi, dan manfaat potensial yang tinggi atas terwujudnya kebijakan.

1.5.2.2.2 Derajat Kekuatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kekuatan memiliki kata dasar “kuat” yang mana dapat diartikan sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda). Dalam konteks kekuatan yang dimiliki stakeholder, kekuatan tersebut dimaksudkan sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap hal lainnya.

Derajat kekuatan dari *stakeholder* sangat penting untuk dipetakan karena berguna untuk menjadi acuan mengategorikan *stakeholder* ke dalam posisi kuadran. Kekuatan dari masing-masing *stakeholder* diorganisir kemudian dianalisis. Dalam proses kebijakan dari program pengolahan limbah sampah ini *stakeholder* dapat diidentifikasi melalui wewenang dan pengaruhnya. Berikut klasifikasinya:

- Rendah: Tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, dan mempengaruhi pihak lain dalam pelaksanaan kebijakan
- Sedang: Memiliki kewenangan yang terbatas dalam pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, dan mempengaruhi pihak lain dalam pelaksanaan kebijakan
- Tinggi: Memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan mempengaruhi pihak lain dalam pelaksanaan kebijakan.

1.5.2.2.3 Hubungan Antar *Stakeholder*

“a commonly used means of describing stakeholder interrelations is through actor linkage matrices (Biggs and Mutsaers, 1999; ODA, 1995)...One popular method for example is to determine whether relationships between each stakeholder are of conflict, complementary, or cooperation” (Reed, dkk, 2009: 1939)

Hubungan antar *stakeholder* mengandung pengertian adanya sifat saling ketergantungan satu sama lain terkait masing-masing kepentingan sebagai suatu sistem yang berfungsi.⁵⁹ Hubungan antar *stakeholder* dilihat sebagai hubungan yang mengalami perkembangan, hubungan tersebut bersifat teratur berdasarkan kebijakan yang diterapkan, yang mana memuat harapan yang akan diperoleh dan diterima dari hubungan antar *stakeholder*.

Sifat saling ketergantungan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam suatu aktivitas kehidupan, khususnya makhluk hidup yang memiliki kepentingan. Saling ketergantungan ini mencakup hubungan dan

⁵⁹ Bambang Rudito & Melia Famiola. *CSR corporate social responsibility*. Bandung: Rekayasa Sains, 2013. Hlm. 176-177

pengaruh para *stakeholder*. Pola saling ketergantungan terjadi atas dasar adanya kepentingan dan kekuasaan para *stakeholder*, yaitu (a) kepentingan dari setiap *stakeholder* berbeda; (b) kekuatan kekuasaan dari setiap *stakeholder* juga berbeda. Artinya kekuasaan tidak dapat hanya berpusat pada satu *stakeholder* saja, melainkan kepada masing-masing *stakeholder*; (c) terjadi perubahan signifikan dalam kepentingan dari kekuasaan *stakeholder* dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan penelitian ini yang mengacu pada perspektif *governance*, hubungan antar *stakeholder* berupa:

1. Pemerintah dengan Swasta

Pemerintah pada dasarnya memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan publik yang berlaku di suatu negara dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan yang lain untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, pemerintah membutuhkan aktor lain agar menjaga keseimbangan kinerja dan melibatkan masyarakat dalam agenda pembangunan, salah satunya adalah sektor swasta. Sektor swasta memiliki suatu sistem dan interaksi kepada masyarakat secara langsung sehingga menimbulkan dampak positif dalam hubungan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta tersebut. Kerja sama tersebut berupa kerja sama pemerintah pusat dengan sektor swasta atau pemerintah daerah dengan sektor swasta yang dijalankan sesuai amanat perundang-undangan.

2. Pemerintah dengan Masyarakat

Peran pemerintah sebagai lembaga negara yang menyediakan kebutuhan publik bagi masyarakat dalam implementasinya membutuhkan sinergitas dengan masyarakat secara langsung. Keberadaan masyarakat sendiri adalah sebagai aktor penentu dari suatu program maupun kebijakan dari pemerintah agar berjalan dengan baik. Maka dari itu perlu kesinambungan dan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri.

3. Swasta dengan Masyarakat

Sektor swasta yang mempunyai sumber daya dalam hal ekonomi, sosial, maupun budaya dalam menjalankan sumber daya tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang dalam hal ini berfungsi

sebagai konsumen. Kerja sama dan hubungan yang bagus akan semakin mempercepat proses *sharing value* antar keduanya.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) memungkinkan adanya hubungan yang baik, kerja sama, dan kesejajaran antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Desentralisasi wilayah juga berperan dalam merespon kebutuhan masyarakat yang ada, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan maupun program, pemerintah bukanlah aktor satu- satunya. Tetapi juga ada keterlibatan sektor swasta dan masyarakat secara langsung di dalamnya.⁶⁰

Untuk menyelidiki hubungan antar *stakeholder* digunakan metode *actor linkages matrices* yang menggunakan matriks berisi para *stakeholder* dalam tiap kolom dan barisnya dan hubungan antar *stakeholder* hasil identifikasi berupa konflik, pelengkap atau kerja sama.

1.5.2.2.3.1 Konflik Stakeholder

Lingkungan yang melibatkan banyak pihak atau *stakeholder* memiliki potensi terjadinya konflik. Mc Shane dan Von Glnow, mendefinisikan konflik sebagai suatu proses dimana salah satu pihak menganggap bahwa kepentingannya bertentangan dengan pihak lain.⁶¹ Pandangan tersebut didasari oleh fakta bahwa setiap individu memiliki heterogenitas dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Perbedaan yang terjadi di dalam interaksi antara setiap *stakeholder* menempatkan konflik sebagai hal yang dianggap negatif, karena itu konflik menciptakan ketidaksepahaman di antara pihak.

Sehingga dapat disimpulkan konflik merupakan sebuah proses yang ditemui ketika suatu pihak memiliki persepsi terhadap pihak lain karena telah mempengaruhi secara negatif suatu kepentingan atau perilaku dari pihak pertama.

Dampak dari konflik salah satunya adalah banyak menciptakan ketidak efisienan dalam berbagai sendi dalam lingkungan kerja (*conflict is bad perspective*) dan mengakibatkan ketidak nyamanan antar *stakeholder* atau perasaan saling curiga. Lalu pada era 1970 – 1990an, muncul persepsi lain yang memandang

⁶⁰ Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Cetakan Kedua*. Bandung: Mandar Maju, 2004.

⁶¹ Mc Shane, S.L & Von Glnow, M.A.Y. *Organizational Behavior: Emerging Knowledge and Practice for the Real Word*. New York: Mc Graw Hill, 2010. Hal 328

konflik dengan kaca mata yang lebih positif. Dalam hal ini, konflik dianggap dapat memperkuat hubungan antar *stakeholder* atau pihak (jika yang berkonflik dapat saling berkomunikasi dengan baik), serta menumbuhkan kepercayaan kepada pihak lain. Dampak lain yang ditimbulkan dari adanya konflik yaitu bagi setiap *stakeholdernya* akan lebih terasah untuk memiliki alternatif pemecah masalah karena adanya keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk bersama.

1.5.2.2.3.2 Kerja Sama Stakeholder

Menurut Zainudin, pengertian kerja sama adalah seorang atau pihak yang memiliki kepedulian dengan pihak lain sehingga membentuk suatu kegiatan bersama yang menguntungkan seluruh anggota yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, kerja sama dapat tercapai jika diperoleh manfaat bersama bagi seluruh pihak (*win – win*). Apabila salah satu pihak dirugikan dalam proses kerja sama, maka tujuan kerja sama tidak lagi terpenuhi. Sehingga diperlukan komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman yang sama terhadap tujuan bersama.

Sehubungan dengan penelitian ini, kerja sama mencakup perilaku antar *stakeholder* yang berupa saling mengisi dan saling kerja sama.

- a. Saling Mengisi, yaitu hubungan antara *stakeholder* satu dengan yang lain memiliki peranan yang sejalan dan dapat bersinergi, sehingga *stakeholder* yang memiliki hubungan saling mengisi ini dapat berperan melengkapi maupun *back up* terhadap *stakeholder* lain yang terkait.
- b. Saling Kerja Sama, yaitu hubungan antara *stakeholder* dimana *stakeholder* yang memiliki kepentingan atau peran membutuhkan peranan dari *stakeholder* lainnya untuk mencapai tujuan. *Stakeholder* yang termasuk dalam hubungan saling kerja sama memiliki peran dan kepentingan yang berbeda sehingga tidak dapat bersinergi, namun keberadaan atau perannya dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama.

I.5.3 Kerja Sama Internasional

1.5.3.1 Definisi Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh negara dengan negara lain atas nama warganya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjaga keamanan secara nasional. Menurut Dougherty dan Pflatzgraff (1997), kerja sama internasional berarti hubungan antara negara berbeda yang tidak adanya unsur kekerasan atau paksaan dengan disahkan secara hukum internasional dalam upaya memberikan kebebasan dalam membangun negaranya.⁶² Seluruh negara yang ada di dunia akan senantiasa memiliki ketergantungan dengan negara lain. Hal tersebut terbukti oleh fakta yang ada bahwa setiap bangsa yang secara de facto dan de jure merdeka tidak akan pernah bisa mandiri tanpa adanya bantuan dari negara lain, dalam rangka tersebut maka setiap negara pasti menyelenggarakan hubungan dengan pihak lain yang lazim disebut kerja sama internasional. Berbeda dengan kerja sama antar daerah, kerja sama internasional memiliki ruang lingkup yang lebih luas, namun juga memiliki kesamaan mengenai tujuannya yaitu terpenuhinya kebutuhan, penyelesaian masalah dan juga memberikan manfaat serta dorongan untuk mencapai kesejahteraan masing-masing pihak. Seperti kerja sama yang terjalin antara Surabaya – Kitakyushu yang tercipta karena kebutuhan penyelesaian permasalahan lingkungan Kota Surabaya.

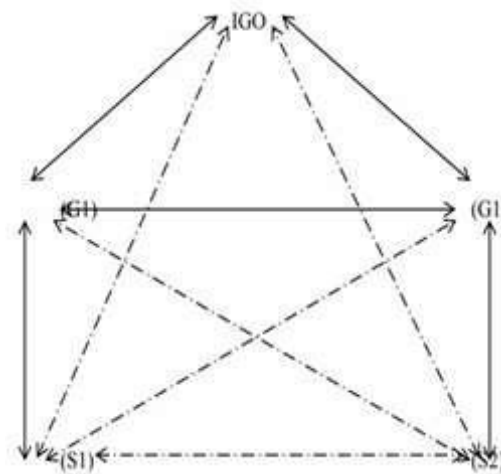
Kerja sama internasional hadir dan dapat dilaksanakan jika setiap stakeholder yang terlibat dalam sebuah kerja sama internasional ini memiliki kebijakan yang mendasari, kebijakan perlu diadakan karena berguna untuk menjadi pedoman atau acuan penyelenggaraan kerja sama tersebut.

Kerja sama internasional pada perjalanannya selalu berkembang dari tahun ke tahun hingga sekarang, yang mana perkembangan kerja sama internasional ini dipengaruhi oleh faktor globalisasi. Globalisasi membawa gaya baru kerja sama internasional, bila dahulu hubungan kerja sama antar negara hanya diwarnai oleh perang dan damai, kini hubungan kerja sama lebih berkembang dengan melingkupi bidang-bidang seperti ekonomi, politik, keamanan, hingga kebudayaan. Seiring

⁶² Dougherty, J. E., & Pflatzgraff, R. L., *Contending Theories of International Relation: A Comprehensive Survey*, 4th ed.. New York: Ed Addison Wesley Longman, 1997.

perkembangan bidang kerja sama yang semakin meluas, memunculkan *stakeholder* baru berupa MNC, INGO, NGO, dan masyarakat transnasional.

Adanya kemunculan *stakeholder* baru yang bersifat *non-state* tersebut menandakan bahwa kerja sama lintas negara saat ini tidak lagi bersifat *state-centric* saja. Sehubungan dengan semakin melonggarnya hubungan kerja sama yang dapat diselenggarakan oleh selain pemerintah pusat, kini pemerintah daerah juga memiliki kesempatan menjadi aktor penyelenggara kerja sama dengan daerah lain di negara berbeda.



Bagan I. 2 Pola Transnasional menurut Joseph S. Nye, Keohane⁶³

Sumber : Sidik Jatmika, Otonomi Daerah Dalam Persepektif Hubungan Internasional

G = *Government* (Pemerintah Pusat)

LG = *Local Government* (Pemerintah Daerah)

S = *Society* (Masyarakat, termasuk didalamnya masyarakat bisnis)

IGO = *International Governmental Organization* (Lembaga Internasional Pemerintah)

————— = Hubungan dalam negeri

- - - - - = Hubungan *transnasional*

Pada gambar I.4 telah digambarkan bahwa hubungan internasional dengan hubungan transnasional memunculkan *stakeholder* baru yaitu *Local Government* baik tingkat I atau tingkat II. Hubungan internasional yang diselenggarakan *local*

⁶³ Jatmika, Sidik. *Otonomi Daerah Dalam Prespektif Hubungan Intenasional*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001.

government dapat berupa hubungan kerja sama kota kembar atau lebih dikenal dengan sebutan kerja sama *Sister City*.

1.5.3.2 *Sister City*

Sister city dapat diterjemahkan menjadi kota kembar, sebagaimana namanya *sister city* merupakan sebuah program hubungan kerja sama yang dilaksanakan oleh suatu kota dengan kota lainnya yang bertujuan untuk saling meniru atau mencontoh sesuatu sesuai tujuan yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang. KEMENDAGRI (Kementerian Dalam Negeri) mendefinisikan *sister city* merupakan sebuah konsep yang melibatkan dua daerah yang secara geografis, administratif dan politik memiliki perbedaan dan bersepakat untuk menjalin hubungan kerjas ama meliputi bidang-bidang yang disepakati.⁶⁴ Sedangkan UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan *sister city* ialah sebuah hubungan kerja sama jangka panjang yang melibatkan beberapa *stakeholder* antara 2 kota secara terbuka.⁶⁵

Pada awalnya *sister city* muncul pada awal abad ke-19 di Eropa, *sister city* mulai dikenal oleh dunia ketika Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower mendirikan *Sister City Organization* yang berpusat di Washington pada tahun 1956, hingga saat ini SCI beranggotakan lebih dari 2000 kota dan provinsi di 136 negara. Menurut SCI (*Sister City Internasional*), *sister city* adalah hubungan kerja sama jangka panjang antara dua kota yang berbeda melalui budaya, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.⁶⁶ Istilah penyebutan untuk hubungan kerja sama kota kembar di Indonesia adalah *Sister City*, hal ini tercantum pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerja sama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri.⁶⁷

⁶⁴ Kementerian Dalam Negeri. *Sister City , peluang emas bagi pembangunan daerah*. Diakses pada 11 Maret 2020 melalui <https://kemendagri.com>; internet. .

⁶⁵ Villers,J.c. *Succes factors and the city to city partnership management process from strategy to alliance capability*. habitat internasional, 2009.

⁶⁶ *What is Sister City ? Sister City Internasional* 2003.

⁶⁷ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerja sama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri, 26 April 1993.

Persyaratan kerja sama *sister city* di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, dinyatakan pada pasal 5, bahwa untuk kerja sama Provinsi dan Kabupaten/Kota “kembar” sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 juga harus memperhatikan: 1) Kesetaraan Status Administrasi. 2) Kesamaan Karakteristik. 3) Kesamaan Permasalahan. 4) Upaya saling Melengkapi. dan 5) Peningkatan Hubungan Antar Masyarakat. Dalam menjalankan kerja sama *sister city*, lazimnya juga terdapat beberapa prinsip yang dipakai guna untuk menentukan relevansitas antar partner ketika menjalin hubungan kerja sama ini⁶⁸, antara lain: (1) Similaritas, adanya kesamaan bersama; (2) Pertukaran, adanya potensi pertukaran dalam bidang edukasi, budaya maupun rekreasi; (3) Hubungan timbal balik, adanya pertukaran yang berjalan dua arah; (4) Berorientasi pada masyarakat, adanya peran aktif dari pemimpin yang terlibat langsung atau mendukung kepentingan masyarakat, baik dalam bentuk organisasi atau bisnis; (5) Manfaat strategis, adanya manfaat yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek yang didapat dari hubungan kerja sama tersebut; (6) Eksklusivitas dan kedekatan, tidak adanya hubungan *sister city* dengan kota lain di negara yang sama atau lokasi yang berdekatan dengan kota partner *sister city*; (7) Kestabilan politik, kedua kota diharapkan tuntas dan stabil atas aktivitas politiknya untuk memperlancar kegiatan kerja sama.

Dengan memperhatikan keseluruhan persyaratan yang tercantum dalam PERMENDAGRI No. 3/2008 dan prinsip penyelenggaraan *sister city*, kerja sama *sister city* dapat diterapkan oleh dua pemerintah kota atau provinsi di daerah berbeda, terkadang pelaksanaan kerja sama ini juga melibatkan NGO, lembaga privat, komunitas, hingga masyarakat. Kerja sama *sister city* menaungi berbagai bidang seperti kerja sama ekonomi, pembangunan, pemerintahan, pengelolaan sumber daya, pendidikan hingga kebudayaan. *Sister city* dapat berdampak positif jika ketersediaan sumber daya dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan tujuan kerja sama bagi kedua pihak, namun juga dapat berdampak negatif jika kedua kota atau salah satu kota tidak mendukung secara maksimal kegiatan yang ada.

⁶⁸ Kelowna, C. O. *Council Policy of Sister Cities*. C. Series. Kelowna, 2010. Hlm. 2.

I.5.3.2.1 *Green City*

Richard Register mendefinisikan *green city* sebagai salah satu kota yang dirancang melalui pertimbangan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang tangguh bagi populasi sekarang untuk generasi mendatang.⁶⁹ Definisi tersebut dilengkapi oleh pernyataan Asian Development Bank bahwa persyaratan sebuah kota disebut “*green*” ialah tidak hanya berdampak positif pada kota bersangkutan tetapi juga berkontribusi terhadap aspek lingkungan level global.⁷⁰

Surabaya sebagai kota yang bercita-cita menjadi *green city* memiliki peraturan yang mendukung, melalui Raperda RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) Jawa Timur tahun 2005-2020, yang menyebutkan bahwa minimal 20% dari luas kota, sebesar 10% berupa hutan kota. *Green city* memberikan ruang bagi kota untuk saling bahu membahu mewujudkan lingkungan masa depan yang hijau dan sehat secara *sustain*.

I.5.4 Program Pengolahan Limbah Sampah

I.5.4.1 Program

Hakikat dari kebijakan adalah sebuah susunan yang dibuat oleh Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Untuk dapat melaksanakan kebijakan, maka diperlukan *breakdown* dari kebijakan tersebut dengan berwujud program. Program sendiri memiliki definisi yaitu sebuah instrument dari kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih tindakan yang dibuat oleh Pemerintah, Lembaga, atau Masyarakat yang diarahkan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷¹

Definisi lain dari Pasolong yang mengartikan program sebagai suatu perkumpulan dari tindakan atau kegiatan yang secara sistematis diselenggarakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau bentuk kerja sama bersama masyarakat yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah dibuat.⁷²

⁶⁹ Register, R. *Ecocities: Rebuilding Cities in Balance with Nature*. Canada: New Society Publishers dalam Dellaverin, N.C., 2019. *Green Sister City Surabaya-Kitakyushu (Studi Evaluasi tentang Program Pengelolaan Limbah Sampah)*. Diakses pada 1 April 2020.

⁷⁰ Asia Development Bank. *Green Cities*. Filipina: ADB Series, 2012. Hlm. 9.

⁷¹ Hanif. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gasindo, 2009. Hlm 137

⁷² Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*, 2010.. Bandung: Alfabeta. Hlm 92

Sehingga definisi dari program dapat disimpulkan yaitu sebuah alat atau wadah bagi kebijakan agar dapat dilaksanakan dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada atau mencapai tujuan sesuai yang telah ditentukan.

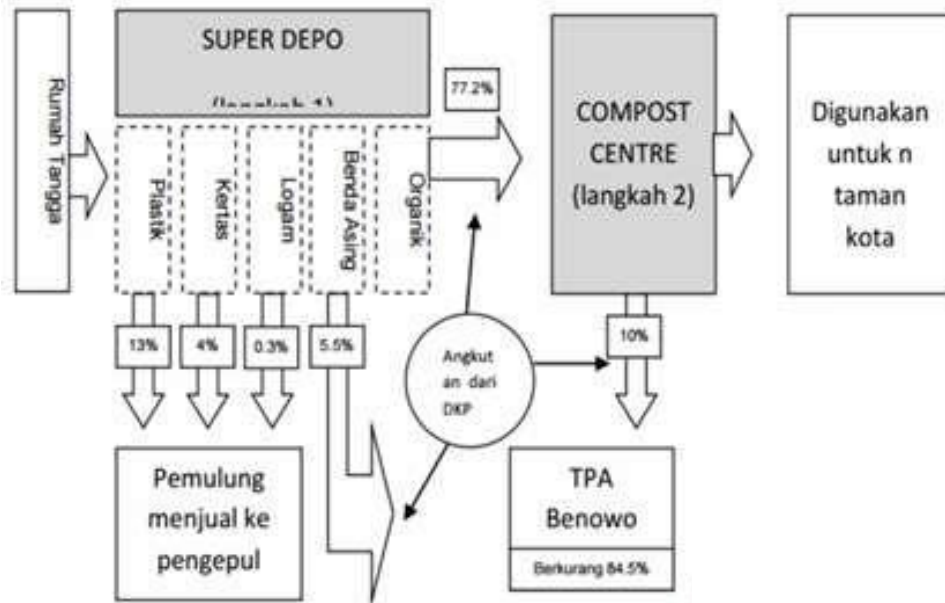
I.5.4.2 Pengolahan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan perubahan paradigma tentang tata cara pengelolaan sampah, yang sebelumnya dikelola dengan cara ‘kumpul-angkut-buang’ menjadi beralih menggunakan teknik 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Berikut penjelasan dari pendekatan 3R:

1. *Reduce*, adalah pendekatan meminimalisir penggunaan barang dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan setiap individu, hal ini dimaksudkan untuk memberikan dampak bagi masyarakat atas kesadaran menjaga lingkungan dan dampak bagi lingkungan itu sendiri berkurangnya polusi atau pencemaran yang dihasilkan sampah atau limbah
2. *Re-use*, adalah pendekatan terhadap barang-barang sekali pakai dengan cara memperpanjang usia pakai untuk digunakan kembali sebelum benar-benar menjadi sampah.
3. *Recycle*, adalah daur-ulangan barang-barang yang telah berstatus sampah yang telah habis nilai gunanya untuk diolah melalui tahapan kimia maupun keterampilan manusia hingga kembali dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai guna kembali.

Konsep 3R ini dipakai dalam pelaksanaan program pengelolaan kembali limbah guna mewujudkan masyarakat rendah karbon di Surabaya yang mana dinaungi dalam payung kerja sama *sister city* yang bermitra dengan Kota Kitakyushu, Jepang, mendapat dukungan bantuan juga dari pihak privat Jepang yakni Nishihara Corporation dan pendanaan dari JICA.

Nishihara *Corp* disini memiliki peran untuk memberikan arahan serta pelatihan mengenai proses pengelolaan sampah dengan menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang melibatkan pemulung setempat dan juga para pengepul.



Gambar I. 3 Proses Pengolahan Sampah di Super Depo Sutorejo

Sumber : Super Depo Sutorejo

Telah digambarkan pada gambar I.5 mengenai proses pengelolaan sampah di Super Depo Sutorejo, secara teknis pengolahan sampah ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

1. Tahap 1

Sampah awal ditimbang, lalu dimasukkan ke Conveyor 1 untuk dipilah.

2. Tahap 2

Conveyor 1 melakukan pemilahan sampah berupa botol plastik, plastik putih dan plastik warna.

3. Tahap 3

Conveyor 2 melakukan pemilahan lebih detail terhadap sampah anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan lagi (termasuk sampah lain-lain).

4. Tahap 4

Conveyor 3 melakukan penanganan terhadap sampah organik dengan cara memasukkan ke mesin pencacah sebagai bahan kompos yang selanjutnya dikirim untuk diolah di rumah kompos.

Super Depo Sutorejo dapat memproses 700 kg sampah /jam. Nishihara mengklaim bahwa metode pengolahan sampah yang benar akan dapat mengurangi sampah rumah tangga hingga 50% dan mereduksi biaya hingga 1/10.⁷³ Semisal 100 kg sampah masuk, 50 kg diantaranya dapat dimanfaatkan kembali dalam bentuk kompos atau sampah daur ulang.

I.5.4.3 Sampah dan Klasifikasinya

Sampah sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, yang mana berupa benda yang telah habis nilai pakainya sehingga harus dibuang agar tidak mengganggu kelangsungan hidup manusia. World Health Organization (WHO) mendefinisikan sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, dan dibuang yang berasal dari kegiatan manusia sehingga tidak terjadi atau terbentuk secara sendirinya.⁷⁴ Namun definisi tersebut dewasa ini sudah bergeser, didukung oleh pernyataan Cointreau yang berpendapat bahwa sampah sudah dianggap bernilai lagi jika dapat diolah dan dimanfaatkan dengan baik.⁷⁵

Sampah dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Lebih lanjut, sampah menurut klasifikasinya juga dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu asal, komposisi, bentuk, lokasi, proses terjadinya, sifat dan lain-lainnya⁷⁶.

- a. Klasifikasi sampah berdasarkan asal
 - 1) Sampah jalan raya
 - 2) Sampah kegiatan industri atau pabrik
 - 3) Sampah kegiatan pertanian dan peternakan
 - 4) Sampah kegiatan perdagangan
 - 5) Sampah kegiatan pembangunan
 - 6) Sampah rumah tangga, termasuk sampah rumah sakit, hotel dan kantor

⁷³ Halo Jepang. *Perusahaan Dari Kitakyushu Perkenalkan Pemilihan dan Pengomposan Sampah*. Diakses pada 13 Maret 2020 melalui <http://www.halojepang.com/industriteknologi/6455-nishimura>; internet.

⁷⁴ Budiman, C. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC, 2007. Hlm. 111.

⁷⁵ Satori, M. "Pendampingan Usaha Masyarakat dalam Memanfaatkan Sampah di Desa Manis Lor Kabupaten Kuningan". *Prosiding UNISBA*, 1(I), 2010: 151.

⁷⁶ Sejati, K.,. *Pengolahan Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Sub Point, dan Center Point*. Yogyakarta: Kanisius, 2009. Hlm. 13-15.

- b. Klasifikasi sampah berdasarkan komposisi
 - 1) Sampah seragam, umumnya berasal dari kegiatan industri.
Contoh : kertas, karton, dan lainnya
 - 2) Sampah campuran, umumnya berasal dari pasar atau tempat umum yang beraneka ragam bercampur menjadi satu
- c. Klasifikasi sampah berdasarkan bentuk
 - 1) Sampah padat (*solid*). Contoh : daun, kertas, karton, plastic, kaleng, logam
 - 2) Sampah cair. Contoh : bekas air pencuci piring, limbah industri cair, bekas cairan tumpah
 - 3) Sampah gas. Contoh : karbondioksida, ammonia, dan lainnya
- d. Klasifikasi sampah berdasarkan lokasi
 - 1) Sampah kota (*urban*), berada di dalam kota besar
 - 2) Sampah daerah, berada diluar kota besar
- e. Klasifikasi sampah berdasarkan proses terjadinya
 - 1) Sampah alami, karena proses alami. Contoh : rontokan daun
 - 2) Sampah non-alami, karena proses dari kegiatan manusia. Contoh : plastik dan kertas
- f. Klasifikasi sampah berdasarkan sifatnya
 - 1) Sampah organik, sampah yang mengandung senyawa organik dan tersusun oleh unsur karbon, hydrogen, dan oksigen. Sehingga sampah jenis ini mudah terurai karena mudah didegradasi oleh mikroba
Contoh : sisa makanan, tulang, kayu, dedaunan, dan lainnya
 - 2) Sampah anorganik, sampah yang tidak tersusun dari unsur karbon, hydrogen, dan oksigen. Sehingga sampah jenis ini sulit terurai karena tidak mudah didegradasi oleh mikroba
Contoh : plastik, kaca, logam, besi, dan lainnya
- g. Klasifikasi sampah berdasarkan jenisnya
 - 1) Sampah kertas, plastik, logam, karet, kulit
 - 2) Sampah kain
 - 3) Sampah kayu
 - 4) Sampah kebun

- 5) Sampah makanan
- 6) Sampah kaca dan keramik
- 7) Sampah abu atau debu

I.6 Definisi Konsep

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu cara pemerintah untuk mengatasi sebuah permasalahan publik dengan cara turut melibatkan pihak lain secara kolektif dalam prosesnya.

2. Program

Program adalah bentuk perwujudan dari kebijakan agar dapat dilaksanakan berupa kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

3. Stakeholder

Stakeholder adalah sekumpulan orang yang membentuk kelompok ataupun perorangan itu sendiri yang memiliki kepentingan dalam suatu kegiatan atau program yang mana aktivitasnya memberikan dampak kepada keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan atau program tersebut.

4. Pemerintah (*Government*)

Pemerintah adalah segenap perangkat negara yang memiliki kewenangan dalam membuat, menerapkan, serta mengevaluasi kebijakan pada wilayah tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

5. Masyarakat (*Civil Society*)

Masyarakat adalah suatu kelompok terdiri dari sejumlah manusia yang bersifat satu kesatuan dan hidup secara bersama di suatu wilayah tertentu dengan membentuk sebuah sistem.

6. Swasta (*Privat Sector*)

Pihak swasta adalah sebuah lembaga atau kelompok yang meliputi penyediaan produksi barang atau jasa dimana pendistribusian barang atau jasa tersebut beorientasi kepada profit (keuntungan).

7. Peran
Peran merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang ketika ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya.
8. *Policy creator*
Policy creator adalah pihak yang berkewenangan untuk menentukan kebijakan untuk menjadi acuan dalam sebuah program.
9. *Coordinator*
Coordinator adalah pihak yang berkewenangan untuk mengatur atau menentukan *stakeholder* yang dapat terlibat dalam program, serta menghubungkan *stakeholder* yang terlibat tersebut dengan sumber-sumber strategis yang dibutuhkan.
10. *Fasilitator*
Fasilitator adalah pihak yang berwenang dalam menyediakan kebutuhan dari sebuah program, serta memastikan kebutuhan tersebut telah terpenuhi
11. *Implementor*
Implementor adalah pihak yang melaksanakan sebuah kebijakan atau program.
12. *Akselerator*
Akselerator adalah pihak yang memberi kontribusi bersifat mempercepat atau berjalan sesuai dengan sasaran tujuan dari program.
13. Dampak
Dampak adalah sebuah pengaruh yang memiliki akibat, baik akibat positif maupun negatif, terhadap suatu kegiatan yang terjadi atau dilakukan.
14. Derajat Kepentingan
Derajat kepentingan adalah ukuran dari perilaku yang ditimbulkan individu/golongan/kelompok terhadap suatu peristiwa/kegiatan yang berkaitan dengan individu/golongan/kelompok tersebut dibutuhkan keberadaannya untuk menyukseskan program.
15. Derajat Kekuatan
Derajat kekuatan adalah ukuran dari perilaku yang ditimbulkan individu/golongan/kelompok terhadap suatu peristiwa/kegiatan yang berkaitan dengan individu/golongan/kelompok dalam menimbulkan pola

yang memiliki daya yang mempengaruhi individu/golongan/kelompok lain terhadap peristiwa/kegiatan tersebut.

16. **Konflik**

Konflik adalah suatu proses dimana pihak satu dengan yang lain memiliki keberterantangan yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing.

17. **Kerja Sama**

Kerja sama adalah bentuk kegiatan bersama yang memberikan keuntungan bagi seluruh pihak yang terkait.

18. **Kerja sama Internasional**

Kerja sama internasional adalah suatu hubungan yang dijalin dalam lingkup yang luas yaitu suatu negara dengan negara lain atas dasar persamaan visi-misi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan yang telah disepakati masing-masing pihak.

19. ***Sister City***

Sister city adalah hubungan yang dijalin oleh Pemerintah Kotamadya atau Pemerintah Kota Administratif dengan pemerintah setingkat di luar negeri dengan berdasarkan asas kerja sama karena kesamaan visi, misi, dan latar belakang yang jelas untuk tujuan yang disepakati masing-masing pihak.

20. ***Green City***

Green city adalah kota atau daerah yang mewujudkan lingkungan yang hijau asri nan sehat secara berkelanjutan dan memberi dampak global untuk tujuan melestarikan dan menyelamatkan lingkungan untuk masa depan.

21. **Pengolahan Limbah Sampah**

Pengolahan Limbah Sampah adalah sebuah kegiatan yang Sampah atau limbah adalah sebuah benda atau peralatan yang telah habis masa pakai dan nilai gunanya sehingga harus dibuang agar tidak mengganggu berlangsungnya kehidupan.

I.7 Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini membutuhkan metode penelitian untuk memperoleh gambaran serta pemahaman mengenai fenomena konstruksi sosial yang sebenarnya terjadi. Metode merupakan

cara sistematis yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai tujuan seperti yang telah direncanakan. Sehingga yang dimaksud dengan metode penelitian ialah seperangkat petunjuk yang telah disusun dengan disesuaikan tujuan dari penelitian sebagai suatu strategi untuk menjawab permasalahan secara ilmiah sehingga memperoleh pengetahuan tentang kebenaran disiplin ilmu yang bersangkutan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini didasarkan pada maksud dan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui, memahami, dan menggambarkan analisis *stakeholder* dalam program pengolahan limbah sampah di Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo. Pada penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk mengungkapkan dan memahami fenomena kekurangan berhasil yang terjadi dalam pelaksanaan program pengolahan limbah sampah dalam aspek peran *stakeholder*.

Fokus dari penelitian kualitatif adalah proses yang sedang berlangsung dalam penelitian. Dalam metode kualitatif, peneliti berusaha untuk membangun dan memahami makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan dari partisipan.⁷⁷ Hasil data dari penelitian kualitatif ialah data deskriptif berupa tulisan maupun lisan yang berasal dari perilaku subjek yang diamati.⁷⁸ Kualitatif memberikan rincian yang lebih kompleks atas fenomena yang sulit diungkapkan dalam metode kuantitatif.

Metode penelitian kualitatif diharapkan mampu memperoleh data untuk memperdalam wawasan mengenai analisis *stakeholder* dalam pengolahan limbah sampah di Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo.

I.7.1 Tipe Penelitian

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tipe deskriptif. Dimana penelitian pada tipe deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan suatu variabel, gejala, atau

⁷⁷ .W. Creswell., ed. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Diterjemahkan oleh Fawaid dan Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

⁷⁸ Robert Bogdan & Steven J. Taylor. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992. Hlm. 21-22.

keadaan secara apa adanya⁷⁹ dan menjelaskan fenomena secara rinci.⁸⁰ Tipe penelitian deskriptif fokus kepada pertanyaan dasar “bagaimana” yang berusaha menyajikan fakta dengan jelas, teliti, terperinci, lengkap dengan tanpa banyak detail yang tidak penting.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif karena dirasa relevan dengan tujuan penelitian, yang mana tipe penelitian deskriptif dalam penelitian ini berusaha menggambarkan tentang analisis *stakeholder* dalam program pengolahan limbah sampah di Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo dengan menggunakan perspektif *governance* untuk menentukan lingkup *stakeholder*, lalu dianalisis menggunakan *power versus interest grid* pada setiap *stakeholder* sehingga diketahui peranan dari setiap *stakeholder*. Sehingga tipe deskriptif dalam penelitian ini tidak bertugas untuk menguji hipotesis tertentu, namun hanya untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena.

Hasil penelitian ini memberikan laporan berisi data untuk memberi gambaran rinci mengenai analisis *stakeholder* dalam program pengolahan limbah sampah di Surper Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo, melalui pengambilan data berupa wawancara informan, observasi di lapangan, studi dokumen resmi dari instansi terkait dan catatan atau memo yang diperoleh dari informan.

I.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* dengan menyesuaikan rumusan masalah penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Super Depo Sutorejo (Jl. Kalisari Timur, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur) dan Rumah Kompos Wonorejo (Jl. Rungkut Asri Timur II No. 5, Rungkut Kidul, Kec. Rungkur, Kota Surabaya, Jawa Timur) karena adanya pertimbangan bahwa Super Depo dan Rumah Kompos merupakan pusat kegiatan pengolahan pengolahan limbah sampah yang mana merupakan salah satu kiat program dari *sister city* Surabaya - Kitakyushu dalam rangka mewujudkan *green city*. Adapun penelitian juga

⁷⁹ Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2013.

⁸⁰ Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005. Hlm. 17.

dilakukan di beberapa instansi terkait program pengolahan limbah sampah ini, yaitu:

1. Pemerintahan Kota Surabaya bagian Administrasi Kerja Sama.
Jl. Jimerto No. 25 – 27 Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur
2. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya.
Jl. Raya Menur No. 31A Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur
3. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (BAPPEKO)
Jl. Pacar No. 8 Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur

Sedangkan mengenai waktu penelitian dimulai dari menyusun rancangan penelitian, hingga pelaksanaan penelitian, penulisan laporan, seminar hasil penelitian, ujian hasil akhir dan perbaikan laporan penelitian, berlangsung hingga penelitian selesai.

I.7.3 Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian kualitatif, hal yang diutamakan ialah keleluasaan, cakupan rentangan informasi dengan menggunakan istilah ‘informan’ pada penentuan sampelnya. Teknik penentuan informan dalam penelitian kualitatif cenderung menggunakan teknik *purposive* dibanding *random sampling* (kuantitatif). *Purposive* memungkinkan informan tidak sepenuhnya ditentukan sebelumnya, namun dapat dikembangkan ketika pekerjaan lapangan dilaksanakan.⁸¹

Untuk melengkapi teknik *purposive*, Goetz dan LeCompte menawarkan beberapa strategi, yaitu (a) *comprehensive sampling*, menguji setiap kasus, atau setiap elemen dalam populasi yang diberikan; (b) *quota selection*, mengidentifikasi sub-kelompok utama dan mengambil nomor secara acak pada masing-masing sub-kelompok; (c) *reputational case selection*, informan terpilih dalam rekomendasi seorang ahli atau seorang informan utama; (d) *comparable case selection*, memilih individu-lokasi dan grup pada relevansi karakteristik yang sama pada suatu waktu (strategi tiruan).⁸²

⁸¹ Miles, M. B., Huberman, A. M. & Saldana, J., “Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebooks”. 3rd penyunt. Thousands Oaks: SAGE Publications, 2014. Hlm. 46.

⁸² *Ibid.* Hlm. 47.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini mengadopsi teknik *purposive* dengan dilengkapi *reputional case selection*. Berdasarkan teknik penentuan informan, *key informants* yang dipilih dalam penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif ialah sebagai berikut:

1. Ibu Rahmasari selaku Staf Bagian Administrasi Kerja sama Luar Negeri dari Bagian Administrasi Kerja sama Pemerintah Kota Surabaya.
2. Ibu Khoirun Nisa selaku Kasi (Kepala Seksi) Pemanfaatan Sampah dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya.
3. Bapak Agung selaku Koordinator Penyelia, Bidang Sarana Prasarana Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya.
4. Ibu Suci Kristanti selaku Koordinator Super Depo Sutorejo.
5. Bapak Supri selaku Koordinator Rumah Kompos Wonorejo.
6. Bapak Anton dan Bapak Harno selaku perwakilan masyarakat.
7. Prof. Johan Silas (Dosen Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya) selaku perwakilan akademisi.
8. Bapak Wahyu Harianto (Jurnalis Surya) selaku perwakilan Media Massa.

Dari beberapa informan yang telah dipilih, peneliti mendapatkan informasi-informasi terkait program pengolahan limbah sampah yang memang peneliti butuhkan untuk mendukung data-data lain yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti dari observasi dan studi dokumen.

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini secara empirik, dibutuhkan data yang relevan terkait program pengolahan limbah sampah di Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo. Data dalam penelitian adalah hal yang sangat penting, karena dengan data, peneliti mampu mengetahui secara langsung fenomena sosial yang sebenarnya terjadi untuk kemudian dianalisis menggunakan teori yang digunakan sesuai permasalahan penelitian.

John W. Creswell dan Quin Patton memaparkan prosedur dalam pengumpulan data yang mana digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, ada 4 (empat) langkah yaitu:

1. Wawancara Kualitatif

Proses pengumpulan data primer secara wawancara atau *interview* adalah dengan cara tanya jawab secara langsung dengan informan, baik secara tatap muka langsung, melalui telepon, maupun *focus group interview*.⁸³ Data yang dihasilkan berupa kutipan langsung tentang pengalaman-pengalaman, pendapat, apa yang dirasakan dan yang diketahui dari informan penelitian.⁸⁴ Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan pada pihak atau Dinas terkait program pengolahan limbah sampah yakni Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya dan pihak yang bertanggung jawab atas hubungan kerja sama *green sister city* Surabaya dan Kitakyushu yakni Pemerintahan Kota Surabaya bagian Administrasi Kerja sama. Wawancara juga akan dilakukan dengan partner green sister city yaitu Pemerintah Kota Kitakyushu, serta perwakilan dari pihak Kitakyushu sebagai *partner green sister city* Surabaya yakni, perwakilan dari Nishihara Corporation. Instansi terlibat selanjutnya yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya. Pihak yang tidak luput dari penelitian ini juga masyarakat yang terdiri dari akademisi maupun karyawan-karyawan yang bertanggung jawab dan bertugas di Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo.

2. Observasi Kualitatif

Proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian.⁸⁵

Jenis observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini mengacu pada Creswell, yaitu peneliti dapat terlibat langsung dalam menjalankan berbagai peran, sebagai non-partisipan atau partisipan utuh dari program yang diteliti.⁸⁶ Peneliti berperan sebagai salah satu pengunjung untuk melihat dan

⁸³ J.W. Creswell., ed. 2014., *Op. Cit.* Hlm. 166.

⁸⁴ Patton, M. Q. "How to Use Qualitative Methods in Evaluation". Newbury Park: SAGE Publications, 2011. Hlm. 352.

⁸⁵ J.W. Creswell., ed. 2014., *Op. Cit.*, Hlm. 254.

⁸⁶ J.W. Creswell., ed. 2014., *Op. Cit.*, Hlm. 267.

mengamati seluruh kegiatan yang berlangsung, kondisi Super Depo Sutorejo termasuk cara pengolahan sumber daya dan prasarananya.

3. Studi Dokumen Kualitatif

Studi dokumen berupa arsip tertulis, termasuk beberapa sumber seperti barang-barang dalam tulisan terbuka yakni kuesioner, catatan pribadi atau memo, dan catatan program (jika memungkinkan, notulensi rapat).

Hasil dari studi dokumen berupa kutipan tertulis (*excerpt*), kutipan (*quotations*) atau seluruh bagian dari catatan atau rekaman, korespondensi, laporan resmi dan survey terbuka (*open-ended*).⁸⁷

4. Materi Audio dan Visual Kualitatif

Pengumpulan data jenis ini dapat berupa objek seni, *videotape*, atau segala jenis suara/bunyi. Selain itu, prosedur pengumpulan data kreatif yang masuk ke dalam etnografi visual dan juga mencakup kisah hidup, naratif visual metafora, dan arsip digital.

I.7.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, untuk membuktikan data agar dapat dipercaya disebut dengan keabsahan data. Keabsahan data sangat dibutuhkan sebagai pembuktian data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara teoritis maupun praktis. Pada penelitian ini, untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi sumber data memungkinkan peneliti untuk *me-recheck* temuannya dengan cara membandingkan dengan sumber, metode, atau teori. Kegiatan membandingkan ini berarti mem-validasi informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara dengan memeriksa dokumen program dan bukti tertulis lainnya yang dapat menguatkan apa yang dilaporkan oleh informan wawancara.

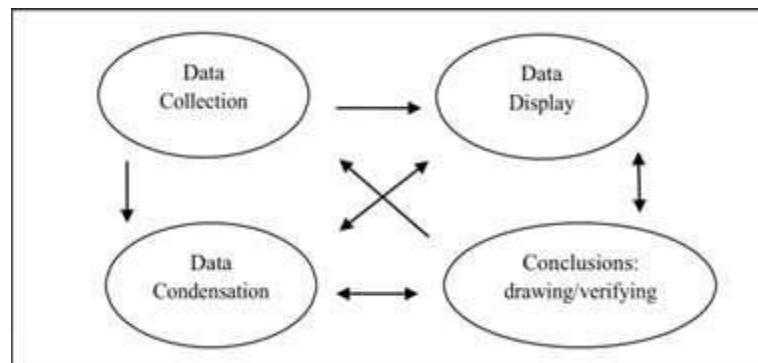
1. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara mendalam. Dalam proses ini peneliti membandingkan pengamatan saat observasi dengan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.

⁸⁷ Patton, M. Q., 2011. *Loc.Cit.*

2. Membandingkan perspektif para informan dengan sudut pandang yang berbeda. Sehingga berarti penarikan kesimpulan tidak dilakukan secara langsung saat penyampaian informasi atau data dari informan, melainkan mengumpulkan terlebih dahulu informasi atau data dari berbagai sudut pandang.
3. Mem-validasi informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan memeriksa dokumen program dan bukti tertulis lainnya yang dapat menguatkan apa yang dilaporkan oleh responden wawancara. Hal ini menjadikan hasil temuan penelitian menjadi lebih kuat dan dapat dibuktikan oleh data yang tersedia.

I.7.6 Teknik Analisis Data

Analisa merupakan proses dari suatu upaya memasukkan perintah penelitian ke dalam data, mengatur apa yang ada pada pola, kategori dan unit deskriptif dasar.⁸⁸ Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber selanjutnya harus dilakukan analisis data dan informasi untuk kemudian dapat ditarik sebagai sebuah kesimpulan.



Gambar I. 4 Komponen Data Analisis: Model Interaktif

Sumber: Miles, M. B., & Huberman, A. M. dalam *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nded.)⁸⁹

Menurut Saldana, Johnny, Matthews B Miles, and A. Michael Huberman, analisis data merupakan kegiatan analisis yang terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. *Data Condensation*

Kondensasi data merujuk pada suatu proses dalam pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi atau merubah suatu data ke dalam bentuk

⁸⁸ Patton, M. Q., 2011. *Op.Cit.* Hlm. 144.

⁸⁹ Miles, M. B., Huberman, A. M. & Saldana, J. 2014. *Op.Cit.* Hlm. 33.

kumpulan tulisan (*corpus*) dari tulisan catatan di lapangan, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi empiris lainnya. Kondensasi data terjadi secara terus menerus selama proses penelitian kualitatif berlangsung.

Kondensasi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, mengerutkan, memfokuskan, membuang yang tidak perlu, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan akhir dan verifikasi.

2. *Data Display*

Langkah selanjutnya setelah dilakukan kondensasi data adalah penyajian data. Penyajian data membantu kita untuk memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Secara umum, penyajian data dapat berupa grafik, bagan, matrik, dan jaringan. Pada penelitian kualitatif penyajian data yang sering digunakan berbentuk teks yang bersifat naratif.

Data disajikan dengan maksud mengumpulkan informasi yang terorganisir ke dalam bentuk yang ringkas dan mudah diakses sehingga memudahkan peneliti untuk melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan.

3. *Drawing and Verifying Conclusion*

Langkah terakhir dalam aktivitas analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif menginterpretasikan makna benda-benda, pola, penjelasan, hubungan sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan awal tersebut masih bersifat sementara sehingga dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sehubungan dengan ini, penelitian ini akan menarik kesimpulan yang dipaparkan secara rinci dan ringkas mengenai analisis *stakeholder* dalam program pengolahan limbah sampah di Super Depo Sutorejo Kota Surabaya.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa dengan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan/mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Sehingga data yang dihasilkan merupakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku yang diamati.

I.7.7 Rincian Data yang Dikumpulkan

Selama proses penelitian, dilakukan pengumpulan data yang bertujuan untuk menjawab fokus permasalahan penelitian secara empiris. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis *stakeholder* dalam program pengolahan limbah sampah di Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo. Data dan informasi pendukung yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Sebelum peneliti terjun ke lapangan, tentunya peneliti telah merencanakan untuk mengumpulkan data apa saja yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian yang tentunya mengarah pada jawaban deskriptif kualitatif.

Rencana dan realisasi rincian data yang dikumpulkan dalam penelitian ini peneliti sajikan pada tabel I.7 berikut.

Tabel I. 7 Rencana dan Realisasi Data yang Diperoleh Selama Proses Penelitian

No	Jenis Data	Rencana	Realisasi	Keterangan
Wawancara				
1	Identifikasi dan keterlibatan para <i>stakeholder</i> dalam program pengolahan limbah sampah	√	√	Didapatkan data wawancara mendalam dengan <i>stakeholder</i> yaitu Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya, Super Depo Sutorejo, Rumah Kompos Wonorejo, Masyarakat, Media Massa, dan Akademisi. Namun untuk <i>stakeholder</i> Pemerintah Kota Kitakyushu dan Nishihara Corporation tidak mendapatkan kesempatan wawancara langsung dikarenakan beberapa alasan.
Observasi				
2	Kegiatan proses implementasi dari pengolahan limbah sampah di Super Depo Sutorejo	√	√	Peneliti berhasil melakukan observasi di lapangan langsung dengan mendapatkan data cara pengolahan yang dijelaskan oleh staf pengolahan sampah dan dokumentasi berupa foto dan audio.
3	Kegiatan proses koordinasi atau kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (BAPPEKO), Rumah Kompos Wonorejo, Super Depo Sutorejo, Media Massa, Masyarakat, Akademisi.	√	-	Tidak didapatkan peneliti karena situasi dan kondisi pandemi, maka koordinasi sedang kurang intensif dan dilakukan secara daring.

Studi Dokumen				
4	Data profil Pemerintah Kota Surabaya Bagian Administrasi Kerja sama	√	√	Dokumen profil Pemerintah Kota Surabaya berhasil didapatkan melalui website resmi Pemerintah Kota Surabaya.
5	Data profil Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH)	√	√	Dokumen profil Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) berhasil didapatkan melalui website resmi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH)
6	Data profil Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya	√	√	Dokumen profil Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya berhasil didapatkan melalui website resmi Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya
7	Dokumen notulensi dalam rapat atau dokumen yang mendukung substansi permasalahan pada penelitian	√	√	Notulensi tidak dapat didapatkan dengan alasan notulensi hanya untuk peserta rapat namun didapatkan dokumen MoU <i>Sister City</i> Surabaya – Kitakyushu
8	Data laporan pemilahan sampah di Super Depo Sutorejo	√	√	Berhasil didapatkan dari koordinator Super Depo Sutorejo
9	Data laporan pemasukan bahan baku dan persediaan kompos	√	√	Berhasil didapatkan dari koordinator Rumah Kompos Wonorejo
Materi Audio dan Visual Kualitatif				
10	Dokumentasi visual terkait program pengolahan limbah sampah	√	√	Berhasil didapatkan ketika studi lapangan, baik secara online maupun offline
11	Dokumentasi audio terkait program pengolahan limbah sampah	√	√	Berhasil didapatkan ketika studi lapangan, baik secara online maupun offline